

**BEKERJA BERSAMA
MERANGKUL SEMUA**



**Meratus
Geopark**



**Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan
Nomor 031 Tahun 2025 tentang
Rencana Strategis Perangkat Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2025-2029
Tanggal 12 September 2025
Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2025 Nomor 31**

Rencana Strategis

Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2025-2029

SEKRETARIAT DAERAH

KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan rasa puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya telah disusun Rencana Strategis Perubahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029.

Sesuai Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyiapkan RENSTRA SKPD sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan, Perencanaan Pembangunan Daerah, di mana Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029. Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ini disusun dengan memperhatikan perkembangan lingkungan strategis baik di lingkungan internal maupun lingkungan eksternal yang saling berpengaruh dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Rencana Strategis ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategi, kebijakan, program, kegiatan serta sasaran dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan selama kurun waktu lima tahun ke depan (Tahun 2025-2029) begitu juga dengan indikator pencapaian kinerja dari sasaran yang telah ditetapkan menjadi dasar bagi penilaian Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada akhir tahun anggaran.

Akhirnya Penyusunan Rencana Strategis Perubahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 ini dapat diselesaikan atas bantuan dan partisipasi semua pihak, dengan ini kami ucapkan terima kasih.

Banjarbaru, Maret 2025

Sekretaris Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan,



MUHAMMAD SYARIFUDDIN, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19671030 199412 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
BAB II.....	7
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	7
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	59
3.1 Tujuan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029	59
3.2 Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029	60
3.3 Strategi Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029	66
3.4 Arah Kebijakan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2025-2029	68
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	73
4.1 Uraian Program	73
4.2 Uraian Kegiatan	74
4.3 Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif	120
4.4 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah	146
4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan	149
4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	151
BAB V PENUTUP	152

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis.....	54
Tabel 2.2 Sustainable Development Goals (SDGs), atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	56
Tabel 2.1.4 Jenis-jenis Kerja sama Daerah	44
Tabel 2.6 Capaian Kinerja Sekretariat Daerah	34
Tabel 2.7 Realisasi Keuangan Belanja dana APBD Provinsi Kegiatan Langsung Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan	38
Tabel 2.8 Realisasi Keuangan Belanja APBD Provinsi Kegiatan Langsung Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024	39
Tabel 2.10 Permasalahan umum yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi	45
Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran PD	62
Tabel 3.4 Pentahapan Renstra PD	67
Tabel 3.5 Arah Kebijakan Renstra PD	71
Tabel 4.2 Teknis Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD	77
Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan.....	120
Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	146
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama PD	149
Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci PD	151

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.....	ii
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan	8
Gambar 2.2 Pohon Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan	11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (4) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa Kepala Perangkat Daerah menyiapkan rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJM Daerah dan RPJP Daerah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Hal tersebut juga sesuai dengan Pasal 25 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Di samping itu, sesuai dengan diktum kedua Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan setiap instansi pemerintah sampai tingkat Eselon II, wajib menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah.

Rencana Strategis (RENSTRA) memuat penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program serta kegiatan yang akan dijalankan selama 5 (lima) tahun ke depan dan dijalankan dalam rencana kerja tahunan mulai Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.

Dengan disusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) 2025-2029, maka Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan akan dapat lebih memfokuskan arah pelaksanaan sasaran-sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) dengan disertai strategi pencapaiannya melalui program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2025-2029).

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum yang mendasari penyusunan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kalimantan Selatan;
3. Undang – Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
15. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan;

22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan, Pembangunan, dan Keuangan Daerah; Permendagri 50/2021;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
26. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 03 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
27. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai Tahun 2029 ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi masing-masing Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang terintegrasi dengan tujuan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang telah disepakati bersama,

sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan akan menjadi lebih efektif, efisien, terpadu, berkesinambungan, dan saling melengkapi satu dengan lainnya, dalam satu pola sikap dan pola tindak. Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah untuk memberikan arah dan acuan pelaksanaan program kegiatan di masing-masing Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan agar dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sejalan dengan visi, misi, tujuan sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah dituangkan dalam dokumen Rencana Strategi (RENSTRA) dimaksud.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah 2025-2029

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

3.3 Strategi Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

3.4 Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

**BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

4.1 Uraian Program

4.2 Uraian Kegiatan

4.3 Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif

**4.4 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas
pembangunan daerah**

**4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-
2029 melalui indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah**

**4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun
2025- 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)**

BAB V : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

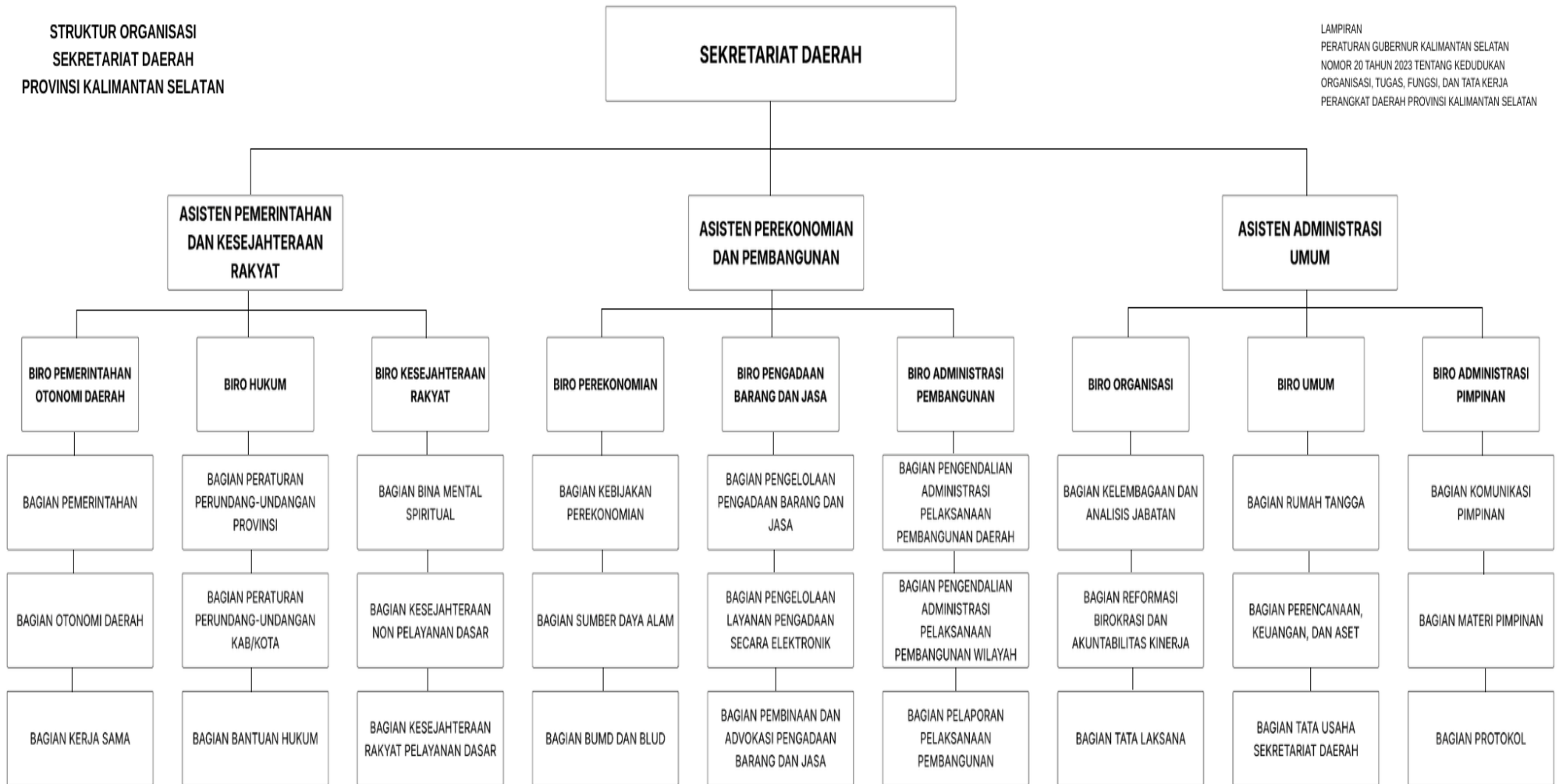
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah sesuai Pergub SOTK

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3);

Sekretariat Daerah merupakan unsur pembantu pimpinan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian tugas Sekretariat Daerah, Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif dan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian tugas Sekretariat Daerah.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan



Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan No 20 Tahun 2023 Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan menyelenggarakan fungsi:

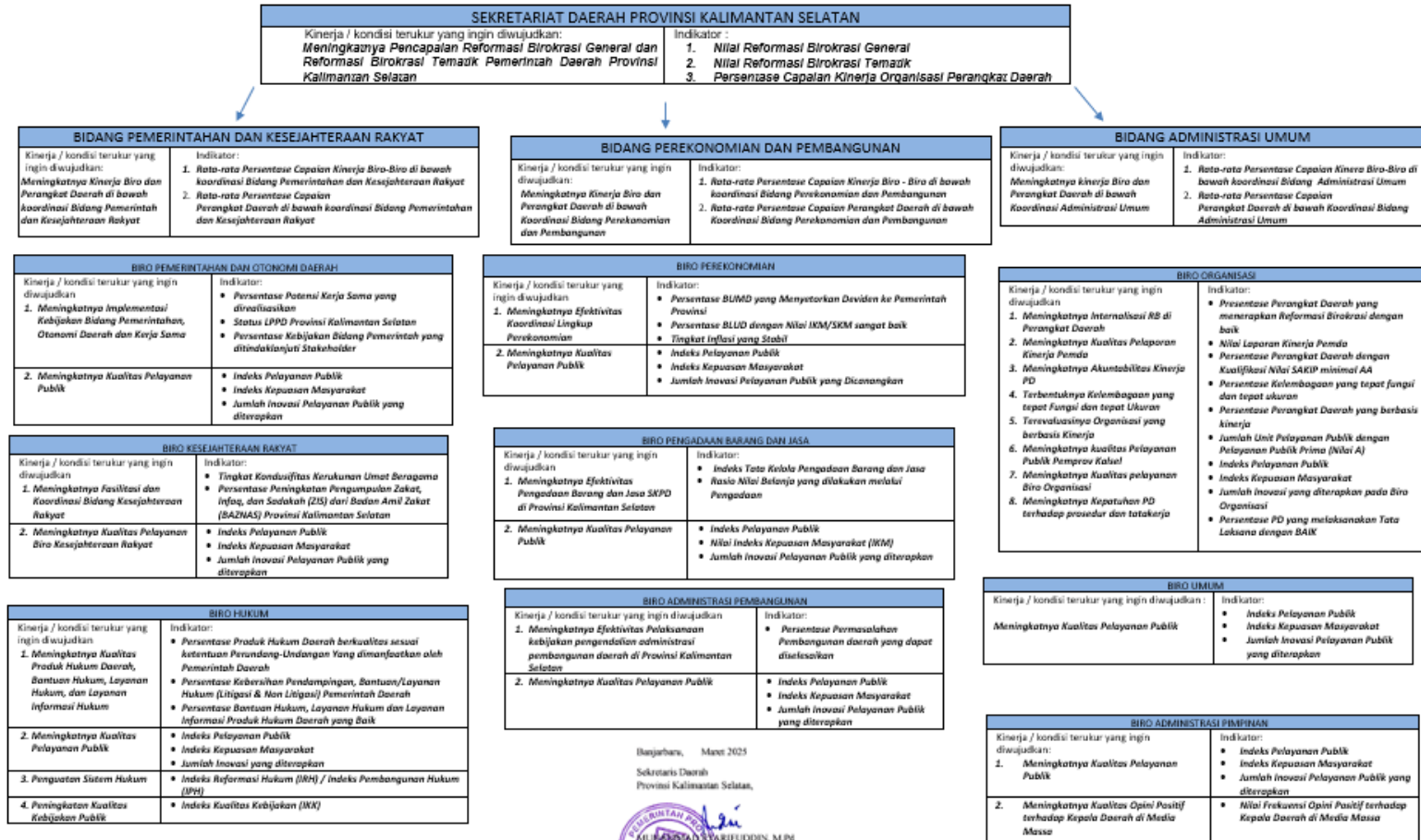
1. Pengoordinasian Penyusunan Kebijakan Daerah;
2. Pengoordinasian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah;
3. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah;
4. Pelayanan Administratif dan Pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Instansi Daerah;
5. Pembinaan Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Hukum, dan Kesejahteraan Rakyat;
6. Fasilitasi Administrasi Perekonomian Daerah, Administrasi Pembangunan, dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa;
7. Pengelolaan Administrasi Umum, Organisasi serta Administrasi Pimpinan; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. merumuskan, mengoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah;
2. merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
3. merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan pembinaan Administrasi;
4. merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan fasilitasi Administrasi Perekonomian Daerah, Administrasi Pembangunan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa;

5. merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan Administrasi Umum, Layanan Pengadaan Barang/Jasa, dan Organisasi;
6. merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan Kebijakan Pemerintah;
7. merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, mengendalikan, dan mengevaluasi pelayanan Administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Instansi daerah; dan
8. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Gambar 2.2 Pohon Kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan



Sekretaris Daerah memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud, dibantu oleh Asisten yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah. Asisten tersebut terdiri dari:

2.1.1.1 Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah, dan hukum; pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di Bidang Kesejahteraan Rakyat, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di Bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah, Kesejahteraan Rakyat, dan Hukum; pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah, Kesejahteraan Rakyat dan Hukum.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan Kebijakan Daerah di Bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Hukum;
2. Pengoordinasian Penyusunan Kebijakan Daerah di Bidang Kesejahteraan Rakyat;
3. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di Bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah, Kesejahteraan Rakyat, dan Hukum;
4. Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Hukum;
5. Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di Bidang Kesejahteraan Rakyat; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di Bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah, Kesejahteraan Rakyat dan Hukum yang berkaitan dengan tugasnya.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi:

a. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerja Sama. Uraian tugas Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan umum penyelenggaraan pemerintahan;
2. Merumuskan kebijakan administratif, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi fasilitasi administrasi Pemerintahan;
3. Merumuskan kebijakan administratif, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi fasilitasi administratif penyelenggaraan otonomi daerah;
4. Merumuskan kebijakan administratif, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi fasilitasi administratif pengembangan dan pelaksanaan kerja sama;
5. Mengoordinasikan, membina, mengawasi, mengevaluasi, fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
6. Mengoordinasikan, membina, mengawasi, mengevaluasi, fasilitasi administratif penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran;
7. Mengoordinasikan, membina, mengawasi, mengevaluasi, fasilitasi administratif penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
8. Mengoordinasikan, membina, mengawasi, mengevaluasi, fasilitasi administratif penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan

9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan daerah di Bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerja Sama;
2. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di Bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerja Sama;
3. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerja Sama; dan
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Unsur-unsur Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah adalah :

1. Bagian Pemerintahan;
2. Bagian Otonomi Daerah; dan
3. Bagian Kerja Sama.

b. Biro Hukum

Biro Hukum sebagaimana dimaksud dalam Bab IV Pasal 4 Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 12 Tahun 2003 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2003 Nomor 12), mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam menyusun kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif di Bidang Peraturan Perundang-undangan Provinsi, Bidang Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kotan, dan Bidang Bantuan Hukum. Uraian tugas Biro Hukum adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi fasilitas Peraturan Perundang-undangan Provinsi;

2. Merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi fasilitas Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota;
3. Merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi fasilitas Bantuan Hukum;
4. Merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pembahasan dan perumusan rancangan produk hukum Daerah serta melakukan kajian hukum untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
5. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Biro Hukum mempunyai fungsi:

1. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan dan kajian penyusunan produk hukum daerah di Bidang Peraturan Perundang-undangan Provinsi, Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota, dan Bantuan Hukum;
2. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di Bidang Peraturan Perundang-undangan Provinsi, Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota, dan Bantuan Hukum;
3. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan, hambatan yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Peraturan Perundang-undangan Provinsi, Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota, dan Bantuan Hukum;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Unsur-unsur Biro Hukum adalah:

1. Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi;
2. Bagian Perundang-undangan Kabupaten/Kota; dan

3. Bagian Bantuan Hukum

c. **Biro Kesejahteraan Rakyat**

Biro Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar, Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar. Uraian tugas Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan umum pembinaan Kesejahteraan Rakyat;
2. Merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan fasilitasi Sarana dan Prasarana Spiritual;
3. Merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual;
4. Merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pembinaan administratif peningkatan mutu pendidikan;
5. Merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pembinaan administratif penyelenggaraan urusan pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan;
6. Merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pembinaan administratif penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan permukiman;
7. Merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pembinaan administratif kesehatan masyarakat dan sosial;
8. Merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pembinaan administratif Pengembangan Kebudayaan;

9. Merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pembinaan administratif pengelolaan Kepariwisata Daerah;
10. Merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pembinaan administratif Pengembangan Pemuda;
11. Merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pembinaan administratif Pembudayaan Olahraga;
12. Merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pembinaan administratif Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Perlindungan Anak;
13. Merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pembinaan administratif Kependudukan dan Keluarga Berencana;
14. Merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pembinaan administratif Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
15. Merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pembinaan administratif penyelenggaraan urusan Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika;
16. Merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pembinaan administratif penyelenggaraan urusan Statistik dan Persandian; dan
17. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan di Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar, Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar;

2. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Non Pelayanan Dasar, Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar;
3. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar, Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar; dan
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Unsur-unsur Organisasi Biro Kesejahteraan Rakyat adalah:

1. Bagian Bina Mental Spiritual;
2. Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar; dan
3. Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar.

2.1.1.2 Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, penyusunan kebijakan daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Perekonomian, Pengadaan Barang dan Jasa serta Administrasi Pembangunan.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan;
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di Bidang Perekonomian, Pengadaan Barang dan Jasa, dan Administrasi Pembangunan;
3. Penyusunan kebijakan daerah di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa;

4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa;
5. Pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan; dan
6. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan Bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi:

1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan;
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di Bidang Perekonomian, Pengadaan Barang dan Jasa, dan Administrasi Pembangunan;
3. Penyusunan kebijakan daerah di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa;
4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa;
5. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di Bidang Perekonomian, Pengadaan Barang dan Jasa serta Administrasi Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan membawahi:

a. Biro Perekonomian

Biro Perekonomian sebagaimana dimaksud mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pembinaan administratif kebijakan Perekonomian, Sumber Daya Alam, BUMD dan BLUD daerah. Biro Perekonomian mempunyai Uraian tugas sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan umum pembinaan Perekonomian;
2. Merumuskan kebijakan administratif, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pembinaan administratif Penyelenggaraan urusan Analisis Ekonomi Makro;
3. Merumuskan kebijakan administratif, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pembinaan administratif penyelenggaraan urusan Analisis Ekonomi Mikro;
4. Merumuskan kebijakan administratif, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pembinaan administratif penyelenggaraan Tata Usaha Biro;
5. Merumuskan kebijakan administratif, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pembinaan administratif penyelenggaraan urusan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan;
6. Merumuskan kebijakan administratif, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pembinaan administratif pengembangan BUMD dan BLUD;
7. Merumuskan kebijakan administratif, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pembinaan administratif penyelenggaraan urusan Pertambangan dan Lingkungan Hidup;
8. Merumuskan kebijakan administratif, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pembinaan administratif penyelenggaraan urusan Energi dan Air; dan
9. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Biro Perekonomian mempunyai fungsi:

1. Perumusan Kebijakan Umum Pembinaan Perekonomian;
2. Perumusan Kebijakan Administratif, Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan, dan Evaluasi Pembinaan Administratif Kebijakan Perekonomian;
3. Perumusan Kebijakan Administratif, Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan, dan Evaluasi Pembinaan Administratif Sumber Daya Alam; dan
4. Perumusan Kebijakan Administratif, Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan, dan Evaluasi Pembinaan Administratif BUMD dan BLUD.

Unsur-unsur Organisasi Biro Perekonomian Daerah adalah:

1. Bagian Kebijakan Perekonomian;
2. Bagian Sumber Daya Alam; dan
3. Bagian BUMD dan BLUD.

b. Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Biro Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan perumusan Kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan Kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di Bidang Pengadaan Barang dan jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik, Pembinaan dan Advokasi serta Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa. Biro Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Menyiapkan bahan Perumusan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa;
2. Melaksanakan Pengoordinasian, Penyusunan Program dan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa;

3. Menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa;
4. Menyiapkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa; dan
5. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Biro Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai fungsi:

1. Penyiapan perumusan Kebijakan daerah di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa;
2. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa;
3. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa, dan
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Unsur-unsur Organisasi Biro Pengadaan Barang dan Jasa adalah:

1. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
2. Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik; dan
3. Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.

c. Biro Administrasi Pembangunan

Biro Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan pengoordinasian perumusan Kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah, dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan. Biro Administrasi Pembangunan mempunyai Uraian tugas sebagai berikut:

1. Pengoordinasian perumusan Kebijakan Daerah Administrasi Pembangunan;
2. Pengoordinasian perumusan Kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBD;
3. Pengoordinasian perumusan Kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBN;
4. Pengoordinasian perumusan Kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah I;
5. Pengoordinasian perumusan Kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah II;
6. Pengoordinasian perumusan Kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan Kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan

Daerah pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah III;

7. Pengoordinasian perumusan Kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah analisis capaian kinerja pembangunan daerah;
8. Pengoordinasian perumusan Kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah;
9. Pengoordinasian perumusan Kebijakan Daerah; pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah kebijakan pembangunan daerah; dan
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Biro Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi:

1. Penyiapan pengoordinasian perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah, Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan;
2. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di Bidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah, Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan;
3. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah,

pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan; dan

4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

Unsur-unsur Organisasi Biro Administrasi Pembangunan adalah:

1. Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
2. Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah; dan
3. Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan.

2.1.1.3 Asisten Administrasi Umum

Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Organisasi, Umum, dan Administrasi Pimpinan. Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan Administrasi Umum;
2. Mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi rumah tangga pimpinan, perencanaan, keuangan, dan aset Sekretariat Daerah serta persuratan dan administrasi kepegawaian Sekretariat Daerah;
3. Mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan komunikasi pimpinan, keprotokolan dan materi pimpinan;
4. Mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Kepegawaian, Keuangan, Komunikasi dan Informasi, pengembangan dan pelatihan Sumber

Daya Manusia serta penghubung Pemerintah Provinsi di Jakarta;
dan

5. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas tanggung jawabnya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Asisten Administrasi Umum mempunyai fungsi:

1. Penyusunan Kebijakan Daerah di Bidang Organisasi;
2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Umum dan Administrasi Pimpinan;
3. Pengoordinasian Pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di Bidang Organisasi;
4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Organisasi;
5. Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di Bidang Umum dan Administrasi Pimpinan;
6. Penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan ASN pada Instansi Daerah; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di Bidang Organisasi, Umum, dan Administrasi Pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

Asisten Administrasi Umum membawahi:

a. Biro Organisasi

Biro Organisasi sebagaimana dimaksud mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan perumusan Kebijakan Daerah, pengoordinasian perumusan Kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Kelembagaan dan Analisa Jabatan, Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja dan Tata Laksana.

Biro Organisasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Kelembagaan dan Analisa Jabatan, Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja dan Tata Laksana;
2. Penyiapan pengoordinasian perumusan Kebijakan Daerah di Bidang Kelembagaan dan Analisa Jabatan, Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja dan Tata Laksana;
3. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di Bidang Kelembagaan dan Analisa Jabatan, Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja dan Tata Laksana;
4. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Kelembagaan dan Analisa Jabatan, Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja dan Tata Laksana; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Biro Organisasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi penataan kelembagaan Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi fasilitasi Kelembagaan Kabupaten/Kota;
3. Merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi ketatalaksanaan dan pelayanan publik;
4. Merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pemberdayaan aparatur dan akuntabilitas kinerja organisasi;

5. Mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan;
6. Mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian daerah;
7. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengembangan sumber daya aparatur Pemerintah Daerah; dan
8. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Biro Organisasi terdiri atas:

1. Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan;
2. Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja; dan
3. Bagian Tata Laksana dan Pelayanan Publik.

b. Biro Umum

Biro Umum sebagaimana dimaksud mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Rumah Tangga, Perencanaan Keuangan dan Aset, dan Tata Usaha Sekretariat Daerah. Biro Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang Rumah Tangga, Perencanaan Keuangan dan Aset, dan Tata Usaha Sekretariat Daerah
2. Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Rumah Tangga, Perencanaan Keuangan dan Aset, Tata Usaha Sekretariat Daerah; dan

3. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Biro Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan administratif, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi perencanaan dan keuangan;
2. Merumuskan kebijakan administratif, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pengelolaan urusan kerumahtanggaan;
3. Merumuskan kebijakan administratif, mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pengelolaan ketatausahaan dan kepegawaian;
4. Mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pembinaan dan fasilitasi administratif fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
5. Mengoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pembinaan dan fasilitasi administratif fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penghubung pemerintah provinsi di Jakarta; dan
6. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Biro Umum sebagaimana dimaksud terdiri atas:

1. Bagian Rumah Tangga;
2. Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Aset; dan
3. Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah

c. Biro Administrasi Pimpinan

Biro Administrasi Pimpinan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Komunikasi Pimpinan, Materi Pimpinan, dan Protokol. Biro Administrasi Pimpinan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:

1. Menyiapkan pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi Pimpinan, Materi Pimpinan, dan Protokol;
2. Menyiapkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Komunikasi Pimpinan, Materi Pimpinan, dan Protokol; dan
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya.

Biro Administrasi Pimpinan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Menyiapkan pelaksanaan kebijakan di Bidang Komunikasi Pimpinan, Materi Pimpinan, dan Protokol;
2. Menyiapkan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di Bidang Komunikasi Pimpinan, Materi Pimpinan, dan Protokol;
3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
4. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Biro Administrasi Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

1. Bagian Komunikasi Pimpinan;
2. Bagian Materi Pimpinan; dan
3. Bagian Protokol.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Jumlah PNS Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 sebanyak 268 orang dengan klasifikasi sebagaimana yang diuraikan dalam tabel berikut ini.

Jumlah PNS di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan jenis kelamin

NO	URAIAN	JUMLAH ORANG
1.	Laki-laki	178
2.	Perempuan	90
TOTAL		268

Jumlah PNS di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Golongan / Kepangkatan

NO	URAIAN	JUMLAH ORANG
1.	Golongan I	1
2.	Golongan II	20
3.	Golongan III	184
4.	Golongan IV	63
TOTAL		268

Jumlah PNS di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan tingkat pendidikan formal

NO	URAIAN	JUMLAH ORANG
1.	SD	1
2.	SLTP	4
3.	SLTA	34
4.	DIPLOMA I	23

5.	DIPLOMA II	1
6.	DIPLOMA III	10
7.	DIPLOMA IV	22
8.	SARJANA (S1)	100
9.	MASTER (S2)	71
10.	DOKTOR (S3)	2
TOTAL		268

Jumlah PNS di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan diklat penjenjangan

NO	URAIAN	JUMLAH ORANG
1.	SPADYA/ADUM/SEPADA/ADUMLA/DIKLATPIM IV	24
2.	SPADAYA/SPAMA/DIKLATPIM III	6
3.	SESPA/SPAMEN/DIKLATPIM II	1
4.	LEMHANAS/SPATI/DIKLATPIM I	0
5.	NON DIKLAT	237
TOTAL		268

Pengembangan Aset yang dikelola oleh Perangkat Daerah Sekretariat Daerah di Lingkungan Sekretariat Daerah

No	NAMA KIB	JENIS ASET	JUMLAH ASET		KUALITAS	
			N-2	N-1	BAIK	BURUK
1.	KIB A	Tanah	77 persil	72 persil	-	-

2.	KIB B	Peralatan dan Mesin	11.364 buah	12.319 buah	12.300 0 Baik	19 Rusak
3.	KIB C	Gedung dan Bangunan	156 buah	156 buah	149 Baik	7 Rusak
4.	KIB D	Jalan, Irigasi dan Jaringan	23 buah	23 buah	18 Baik	5 Rusak
5.	KIB E	Aset Tetap Lainnya	13 buah	13 buah	13 Baik	-
6.	KIB F	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	-	-

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Termasuk Capaian SPM)

Pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan kinerja nyata (realisasi) dengan kinerja yang direncanakan. Pencapaian dipengaruhi oleh pelaksanaan kegiatan, dengan membandingkan antara rencana dengan realisasi untuk masing-masing kelompok indikator, yaitu kinerja *input*, *output* dan *outcome* antara yang direncanakan atau diharapkan dengan realisasinya, atau antara *Performance Plan (Rencana Kinerja)* yang diinginkan dengan *Performance Result (Realisasi Kinerja)* yang dicapai Biro-Biro kemudian dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya *Performance Gap (Celah Kinerja)* karena realisasi berbeda dengan yang direncanakan.

Selama jangka waktu RPJMD Tahun 2021-2026 berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja selama 2021-2024 di mana rata-rata menunjukkan angka yang menggembirakan, yang berarti bahwa antara target dan realisasi dapat terealisasi. Hal itu dapat ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.6 Capaian Kinerja Sekretariat Daerah

Indikator Kinerja	Kondisi Tahun Awal					Target Capaian						Kondisi Akhir Periode (2025)	BIRO
		Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025		
Persentase Terbinanya Lembaga FKUB	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Kesra
Persentase Kelembagaan keagamaan terlibat pada hari-hari besar keagamaan	40	50	50	60	60	70	70	80	80	90	100	100	Kesra
Presentase Sarana keagamaan yang dibina	5	10	10	15	15	20	20	25	30	30	30	35	Kesra
Indeks Kepuasan Masyarakat	75,38	76	76	78,13	80,37	79,5	80,10	80,88	81,01	82,25	84,31	83,63	Organisasi
Kinerja Pemerintahan (Angka)	BB	BB	BB	BB	BB	A	A	A	A	A	BB	A	Organisasi
	76,3	78,52	76,69	78,66	77,29	80,26	80,15	80,55	80,74	80,56	78,49	81,01	Semua Biro
Meningkatnya Kualitas administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Semua Biro
Meningkatnya Pemenuhan Sarana Prasarana Pemda	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Semua Biro
Meningkatnya Kualitas Dok. Perencanaan dan Laporan Kinerja dan Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Semua Biro
Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Semua Biro

Indikator Kinerja	Kondisi Tahun Awal					Target Capaian						Kondisi Akhir Periode (2025)	BIRO
		Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025		
Meingkatnya Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Semua Biro
Meningkatnya Sarana Prasarana Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Semua Biro
Tersedianya Informasi Formasi dengan Persyaratan Kompetensi Jabatan	100	100	?	100	?	100	?	100	?	100	?	100	Organisasi
Tingkat kepuasan layanan kehumasan di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	79,28	80	81,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Hubungan Masyarakat dan Protokol / Biro Administrasi Pimpinan
Tingkat kepuasan layanan materi Pimpinan dan komunikasi Pimpinan di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	-	-	-	69,12	78,01	-	-	-	-	-	-	-	Biro Administrasi Pimpinan
Tingkat kepuasan layanan keprotokolan di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	79,14	80	81,97	81	84,79	-	-	-	-	-	-	-	Hubungan Masyarakat dan Protokol / Biro Administrasi Pimpinan

Indikator Kinerja	Kondisi Tahun Awal					Target Capaian						Kondisi Akhir Periode (2025)	BIRO
		Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025		
Nilai survey kepuasan layanan administrasi pimpinan lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan/Indeks Kepuasan Masyarakat	-	-	-	-	-	75	77,19	90	90,71	95	-	-	Biro Administrasi Pimpinan
Presentase/nilai frekuensi opini positif terhadap Kepala Daerah di media massa	47,66	80%	18,5%	81%	80%	81%	81%	82%	82,43%	83%	-	-	Biro Administrasi Pimpinan
Prosentase BUMD yang Sehat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				Ekonomi
Prosentase BLUD yang Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%				Ekonomi
Tingkat Inflasi yang Stabil	-	0 - ≤ 3%	0,58%	0 - ≤ 3%	6,99%	3 ± 1 %	2,43%	3 ± 1 %	1,95%				Ekonomi
Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	N/A	N/A	100%	100%	3,5 Poin	3,57 Poin	3,5 Poin	3,8 Poin				Semua Biro
Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang Dicanangkan	-	N/A	N/A	1 Buah	1 Buah	1 Buah	1 Buah	1 Buah	1 Buah				Semua Biro
Persentase Produk Hukum Daerah Berkualitas Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan Yang Dimanfaatkan Oleh Pemerintah Daerah (Pemda)	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	Hukum

Indikator Kinerja	Kondisi Tahun Awal					Target Capaian						Kondisi Akhir Periode (2025)	BIRO
		Target 2021	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025		
Persentase Keberhasilan Pendampingan Bantuan/Layanan Hukum (Litigasi & Non Litigasi) Pemerintah Daerah (Pemda)	-	100	100	100	100	100	100	100	100	100	-	-	Hukum
Persentase Bantuan/Layanan Hukum, Dan Layanan Informasi Produk Hukum Yang Baik	--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Hukum
Presentase Kab/Kota yang telah mengimplementasikan RANHAM	100% (13 Kab/Kota)	100% (13 Kab/Kota)	100% (13 Kab/Kota)	100% (13 Kab/Kota)	100% (13 Kab/Kota)	100% (13 Kab/Kota)	100% (13 Kab/Kota)	100% (13 Kab/Kota)	100% (13 Kab/Kota)	100% (13 Kab/Kota)	100% (13 Kab/Kota)	100% (13 Kab/Kota)	Hukum
Pelayanan Administrasi Rumah Tangga daerah	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Umum

Tabel 2.7 Realisasi Keuangan Belanja dana APBD Provinsi Kegiatan Langsung Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

No	Unit Kerja	2022			2023			2024		
		Pagu dana	Penyerapan	%	Pagu dana	Penyerapan	%	Pagu dana	Penyerapan	%
1	Sekretariat Daerah (Dana Rutin)	128.733.829.411	120.140.244.042	93,32	184.037.760.900	163.737.925.567	88,97	205.155.660.147	160.655.805.377	78,31
2	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	2.299.030.430	2.020.325.210	87,88	4.102.064.950	3.651.758.669	89,02	5.541.686.100	4.828.537.658	87,13
3	Biro Hukum	4.794.585.500	3.844.935.006	80,19	4.867.001.800	4.194.180.706	86,17	7.471.247.900	5.455.079.647	73,01
4	Biro Organisasi	3.392.627.500	3.182.268.329	93,80	4.527.558.100	4.301.859.760	95,02	7.378.114.600	6.767.252.297	91,72
5	Biro Administrasi Pembangunan	2.688.755.500	2.564.983.908	80,70	4.436.934.400	4.275.209.695	96,36	8.174.209.300	6.627.182.547	81,07
6	Biro Kesejahteraan Rakyat	134.709.893.700	122.537.167.048	90,96	93.150.796.600	88.849.422.188	95,38	149.992.926.000	131.588.901.984	87,73
7	Biro Administrasi Pimpinan	13.490.224.900	13.029.614.912	96,59	15.225.458.100	14.677.813.385	96,4	27.025.310.804	21.196.345.753	78,43
8	Biro Umum	27.134.704.300	24.078.151.547	88,74	66.726.296.600	57.390.260.373	89,69	66.696.842.900	51.512.306.186	77,23
9	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	4.483.467.500	3.941.239.796	87,91	5.116.520.619	4.575.995.146	89,44	8.262.196.700	7.046.643.959	85,29
10	Biro Perekonomian	2.235.996.400	1.987.921.980	88,91	3.632.337.700	3.257.770.031	86,01	8.205.564.700	4.593.754.897	55,98
JUMLAH		323,963,115,141	297,326,851,778	88,9	385,822,729,769	348,912,195,520	91,25	493.903.759.151	400.271.810.305	79,59

Tabel 2.7 menyajikan realisasi keuangan belanja APBD kegiatan langsung Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun anggaran 2022 hingga 2024. Terlihat bahwa pagu dana dan realisasi penyerapan anggaran mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2022, total realisasi penyerapan anggaran mencapai lebih dari 93% dari pagu yang tersedia. Tahun 2023, tingkat penyerapan sedikit menurun menjadi sekitar 89%, sedangkan pada tahun 2024 turun lagi menjadi 78%. Meskipun terjadi fluktuasi, secara umum tingkat penyerapan anggaran masih tergolong tinggi dan menggambarkan upaya Sekretariat Daerah dalam memaksimalkan penggunaan anggaran yang tersedia.

Tabel 2.8 Realisasi Keuangan Belanja APBD Provinsi Kegiatan Langsung Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024

No	Unit Kerja	2024		
		Pagu dana	Penyerapan	%
1	Sekretariat Daerah (Dana Rutin)	205.155.660.147,-	160.655.805.377,-	78,31
2	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	5.541.686.100,-	4.828.537.658,-	87,13
3	Biro Hukum	7.471.247.900 , -	5.455.079.647 , -	73,01
4	Biro Organisasi	7.378.114.600,-	6.767.252.297,-	91,72
5	Biro Administrasi Pembangunan	8.174.209.300,-	6.627.182.547,-	81,07
6	Biro Kesejahteraan Rakyat	149.992.926.000,-	131.588.901.984,-	87,73
7	Biro Administrasi Pimpinan	27.025.310.804	21.196.345.753	78,43
8	Biro Umum	66.696.842.900,-	51.512.306.186,-	77,23
9	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	8.262.196.700,-	7.046.643.959,-	85,29
10	Biro Perekonomian	8.205.564.700,-	4.593.754.897,-	55,98
JUMLAH		488.715.119.201,-	396.301.045.885,-	81,88

Tabel 2.8 menggambarkan realisasi keuangan belanja APBD kegiatan langsung Sekretariat Daerah pada tahun 2024 secara lebih rinci per unit kerja. Dari total pagu dana sebesar Rp. 488.715.119.201, realisasi penyerapan mencapai Rp. 396.301.045.885 atau sekitar 81,88%. Beberapa unit kerja menunjukkan kinerja penyerapan yang tinggi, seperti Biro Organisasi dengan presentase 91,72% dan Biro

Kesejahteraan Rakyat dengan 87,73%. Sementara unit kerja dengan penyerapan yang relatif rendah, adalah Biro Perekonomian yang hanya mencapai 55,98%. Data ini menunjukkan adanya variasi dalam efektivitas penyerapan anggaran antarunit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran yang menjadi target pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah:

1. Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Dinas, Badan, dan Biro di bawah Pemerintah Provinsi yang membutuhkan koordinasi, fasilitasi, dan pelayanan administratif dari Sekretariat Daerah.
2. Gubernur dan Wakil Gubernur. Sekretariat Daerah bertugas membantu pelaksanaan tugas kepala daerah, termasuk penyusunan kebijakan, administrasi, dan pengelolaan program prioritas.
3. DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam fungsi koordinasi antara eksekutif dan legislatif, Sekretariat Daerah menjadi jembatan untuk mendukung komunikasi, penyusunan kebijakan, dan penganggaran.
4. Instansi Vertikal / Pemerintah Pusat. Kementerian atau lembaga pusat yang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam program nasional, seperti pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, dan lain-lain.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan. Dalam konteks sinergi kebijakan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
6. Masyarakat Kalimantan Selatan. Terutama yang menerima manfaat dari kebijakan dan program yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah, seperti pelayanan publik, program pembangunan, dan bantuan sosial.
7. ASN (Aparatur Sipil Negara) lingkup Pemerintah Provinsi. Sekretariat Daerah mengatur kepegawaian, tata usaha, serta disiplin ASN di lingkungan provinsi.

8. LSM, Media, dan Organisasi Sosial. Dalam rangka transparansi, pelibatan masyarakat, serta diseminasi informasi program pemerintah.

a. Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan

Mitra Internal Pemerintah dalam lingkup provinsi

- Perangkat Daerah Provinsi (Dinas/Badan/Biro) yang merupakan pelaksana utama program sektoral (kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dll.) dan dikoordinasikan serta difasilitasi oleh Sekretariat Daerah.
- Inspektorat, Bappeda, BKD, dan lainnya untuk koordinasi dalam perencanaan, penganggaran, pengawasan, dan manajemen kepegawaian.

Lembaga Pemerintah Pusat

- Kementerian dan Lembaga Nasional (misalnya Kemendagri, KemenPAN-RB, BPKP) yang memberikan arahan kebijakan, pengawasan, serta mendukung pendanaan, dan program pusat.

Pemerintah Daerah

- Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan sebagai mitra pelaksana program yang melibatkan kerja sama lintas tingkatan pemerintahan.

BUMN dan BUMD

- Untuk layanan utilitas publik (transportasi, air bersih, listrik, dll.) serta proyek pembangunan bersama.

Sektor Swasta

- Melalui Kerja Sama Pemerintah dan Swasta (KPS/PPP) untuk infrastruktur, layanan digital, atau proyek CSR.

LSM dan Organisasi Kemasyarakatan

- Mendukung program berbasis masyarakat, kampanye sosial, serta peningkatan kapasitas.

Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset

- Untuk penyediaan data, riset, kajian kebijakan, monitoring, dan evaluasi, dan pelatihan kapasitas.

Media Massa

- Sebagai mitra dalam diseminasi informasi dan strategi komunikasi publik.

Masyarakat Umum dan Masyarakat Sipil

- Sebagai penerima layanan dan partisipan aktif dalam umpan balik kebijakan, forum publik, dan pengawasan sosial.

b. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah

BUMD memberikan kontribusi strategis dalam mendukung pencapaian kinerja Sekretariat Daerah melalui:

1. Penyediaan Layanan Publik yang efisien

BUMD seperti PDAM, perusahaan transportasi daerah, atau layanan energi membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang menjadi bagian dari indikator kinerja pelayanan publik.

2. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kontribusi keuntungan BUMD terhadap PAD memperkuat kapasitas fiskal daerah, yang kemudian mendukung perencanaan dan pelaksanaan program-program yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah.

3. Kemitraan Program Strategis

BUMD dapat dilibatkan dalam proyek-proyek strategis daerah yang membutuhkan sinergi lintas sektor, seperti pengembangan kawasan ekonomi, revitalisasi kota, atau digitalisasi pelayanan.

4. Dukungan Logistik dan Operasional

Dalam beberapa kasus, BUMD mendukung logistik, pengadaan barang dan jasa, serta fasilitas teknis yang menunjang kelancaran tugas administratif Sekretariat Daerah.

5. *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Program CSR BUMD dapat diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan provinsi seperti pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan, yang dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah.

c. **Kerja Sama Daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah**

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan memiliki peran penting dalam memfasilitasi dan mengoordinasikan kerja sama daerah sebagai bagian dari pelaksanaan urusan pemerintahan umum. Jenis-jenis kerja sama tersebut tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2.1.4 Jenis-jenis Kerja sama Daerah

No	Jenis Kerja Sama	Deskripsi	Contoh
1	Kerja Sama Antar Daerah (KAD)	Kerja sama antar Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kabupaten Kota di dalam provinsi atau provinsi lain di Indonesia.	Pengelolaan wilayah perbatasan, distribusi bahan pokok, penanganan bencana lintas daerah.
2	Kerja Sama dengan Pemerintah Pusat	Koordinasi pelaksanaan program nasional yang dijalankan daerah.	Pembangunan jalan nasional. Bantuan sosial pusat, integrasi layanan publik.
3	Kerja Sama dengan Pihak Ketiga (Swasta/LSM)	Kolaborasi untuk mendukung pembangunan daerah, pelayanan publik, dan inovasi sosial.	Proyek KPBU, program CSR di bidang pendidikan atau lingkungan.
4	Kerja Sama Internasional / Lintas Negara	Kemitraan dengan daerah atau institusi dari luar negeri dalam bidang	<i>Sister Province</i> , promosi pariwisata, kerja sama agribisnis dengan negara asing.

		investasi teknologi, budaya.	
5	Pengelolaan Perjanjian Kerja Sama	Administrasi, pengawasan, dan legalitas seluruh bentuk kerja sama daerah yang dilakukan.	Penyusunan MoU (<i>Memorandum of Understanding</i>), monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Tujuan Pembangunan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat daerah Kalimantan Selatan, sehingga mewujudkan visi “KALSEL BEKERJA (Berkelanjutan, Berbudaya, Religi, dan Sejahtera) MENUJU GERBANG LOGISTIK KALIMANTAN”.

Untuk meningkatkan kualitas pembangunan yang diarahkan untuk mendukung terwujudnya masyarakat Kalimantan Selatan yang Berkelanjutan, Berbudaya, Religi, dan Sejahtera, sangat dipengaruhi pula oleh perubahan-perubahan lingkungan strategis internal maupun eksternal dalam skala regional, nasional, dan internasional.

Perubahan-perubahan lingkungan strategis internal maupun eksternal dalam skala regional, nasional, dan internasional tersebut saling terkait memberikan pengaruh terhadap Rencana Strategis (RENSTRA) dan orientasi pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029

2.2.1 Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.10 Permasalahan umum yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

No.	Permasalahan Pokok	Masalah	Akar Masalah
-----	--------------------	---------	--------------

1.	Penerapan kebijakan pada Sekretariat Daerah	Belum optimalnya dukungan dalam penerapan kebijakan	Peraturan dan sistem prosedur kerja yang selalu berubah-ubah.
2.	Pelaksanaan koordinasi pada Sekretariat Daerah	Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi	1. Masih adanya tumpang tindih tugas dan fungsi dengan SKPD lain 2. Masih rendahnya pemahaman OPD terhadap tugas dan fungsi Setda
3.	<i>Standard Operating Procedure</i> pada Sekretariat Daerah	Belum lengkapnya prosedur operasi baku (<i>Standard Operating Procedure</i>)	Masih banyaknya pelaksanaan tugas yang tidak berpedoman pada SOP
4.	Kualitas SDM Aparatur Sekretariat Daerah	1. Belum optimal Kualitas SDM aparatur sekretariat daerah 2. Belum optimalnya pemahaman atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	1. Masih rendahnya kualitas SDM aparatur Sekretariat Daerah 2. Masih rendahnya pemahaman atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
5.	Sarana dan prasarana Pada sekretariat Daerah	Belum optimalnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	1. Kurangnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

			2. Masih belum tersedianya anggaran yang memadai
--	--	--	--

2.2.2 Isu Strategis

a. Kondisi Saat Ini

Secara umum kondisi saat ini dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah belum optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan dalam pengoordinasian kebijakan Pembangunan Daerah:

1. Bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerja Sama.
2. Bidang Peraturan Perundang-undangan, Provinsi, Peraturan Undang-Undang Kabupaten/Kota, Bantuan Hukum.
3. Bidang Penerapan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik di Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Bidang Pengendalian dan Pelaporan Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah.
5. Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar, dan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar.
6. Bidang Materi Pimpinan, Komunikasi Pimpinan, dan Keprotokolan
7. Bidang Pelayanan terhadap *Stakeholder* eksternal dan Internal Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Bidang Pembinaan dan Advokasi, Pengadaan Barang dan Jasa, dan Layanan Pengadaan secara Elektronik.
9. Bidang Kebijakan Perekonomian, Pengelolaan Sumber Daya Alam, Pengelolaan BUMD dan BLUD.

b. Kondisi yang Diharapkan

Kondisi yang diharapkan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah optimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan dalam:

1. Bidang Pemerintahan Otonomi Daerah dan Kerja Sama.
2. Bidang Peraturan Perundang-undangan Provinsi, Peraturan Undang-Undang Kabupaten/Kota, Bantuan Hukum.
3. Bidang Penerapan Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik di Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Bidang Pengendalian dan Pelaporan Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah.
5. Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar, dan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar.
6. Bidang Materi Pimpinan, Komunikasi Pimpinan dan Keprotokolan.
7. Bidang Pelayanan terhadap *stakeholder* eksternal dan internal Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Bidang Pembinaan dan Advokasi, Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, dan Layanan Pengadaan secara Elektronik.
9. Bidang Kebijakan Perekonomian, Pengelolaan Sumber Daya Alam, Pengelolaan BUMD dan BLUD.

c. Analisis Lingkungan Strategis

Analisis lingkungan Strategis terlebih dahulu diawali dengan menentukan prioritas terhadap faktor-faktor lingkungan strategis yang secara spesifik dapat menentukan kondisi yang akan dicapai Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029.

d. Analisis Lingkungan Internal

Kekuatan (Strenghts)

1. Adanya kewenangan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

2. Adanya dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam pelaksanaan tugas-tugas bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
3. Tersedianya tenaga analis dan fungsional, staf teknis yang kompeten.

Kelemahan (Weaknesses)

1. Kurangnya pemahaman atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
2. Belum optimalnya pembinaan tenaga analis, fungsional, staf teknis, dan administrasi untuk dipromosikan dalam jabatan struktural.
3. Belum memadainya sarana dan prasarana kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas (kendaraan operasional, ruang kerja, komputer, dll.)

e. Analisis Lingkungan Eksternal

Peluang (Opportunities)

1. Kebijakan dan komitmen Kepala Daerah terhadap penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Perangkat Daerah yang efektif, efisien, dan profesional berbasis kinerja.
2. Tuntutan peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah daerah.
3. Tuntutan publik untuk mengembangkan penerapan akuntabilitas kinerja di semua Perangkat Daerah Provinsi untuk mendukung terwujudnya *good governance* dan *clean government*.

Tantangan / Ancaman (Threats)

1. Adanya tuntutan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
2. Belum adanya pola hubungan kerja antar Perangkat Daerah dan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Adanya tuntutan meningkatkan koordinasi pelaksanaan program pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pendayagunaan aparatur dengan seluruh Perangkat Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

f. Asumsi Strategis

Asumsi strategis perencanaan pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan menggunakan Analisis *Strenghts, Weaknesses, Opportunities, and Threats (SWOT Analysis)*, sehingga diperoleh asumsi strategis sebagai berikut:

Asumsi Strategis *Strenghts – Opportunities (SO)*

1. Optimallkan kewenangan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan untuk mendukung implementasi kebijakan dan komitmen Gubernur terhadap penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Perangkat Daerah yang efektif, efisien, dan profesional berbasis kinerja.
2. Optimalkan dukungan APBD dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah daerah.
3. Optimalkan tenaga analis jabatan dan hasil analisa beban kerja secara sinergis untuk mengembangkan penerapan akuntabilitas kinerja di semua Perangkat Daerah Provinsi sebagai upaya mendukung terwujudnya *good governance* dan *clean government*.

Asumsi Strategis *Strenghts – Threats (ST)*

1. Manfaatkan kewenangan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
2. Manfaatkan dukungan APBD dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan untuk menyusun pola hubungan kerja antar Perangkat Daerah dan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Manfaatkan tenaga analis jabatan dan hasil analisa beban kerja untuk melakukan evaluasi dan kajian akademis peningkatan koordinasi

pelaksanaan program pemerintahan pembangunan, kemasyarakatan dan pendayagunaan aparatur dengan Perangkat Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Asumsi Strategis *Weaknesses – Opportunities (WO)*

1. Tingkatkan pemahaman atau pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan memanfaatkan kebijakan serta komitmen Kepala Daerah terhadap penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Perangkat Daerah yang efektif, efisien, dan profesional berbasis kinerja.
2. Tingkatkan pembinaan staf teknis dan administrasi untuk dipromosikan dalam jabatan struktural dengan memanfaatkan upaya peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah daerah.
3. Tingkatkan sarana dan prasarana kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas dengan memanfaatkan pengembangan penerapan akuntabilitas kinerja bagi seluruh Perangkat Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Asumsi Strategis *Weaknesses – Threats (WT)*

1. Tingkatkan pemahaman atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk mengantisipasi memanfaatkan adanya tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Tingkatkan pembinaan staf teknis dan administrasi untuk dipromosikan dalam jabatan struktural untuk mengurangi dampak karena belum adanya pola hubungan kerja antar Perangkat Daerah dan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Tingkatkan kualitas dan kuantitas sarana serta prasarana kerja guna mengantisipasi adanya tuntutan peningkatan koordinasi pelaksanaan program pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pendayagunaan aparatur dengan seluruh Perangkat Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

g. Prioritas Asumsi Strategis

Prioritas asumsi strategis ditetapkan dengan menentukan hasil asumsi strategis yang paling dominan dapat mewujudkan visi, misi, tujuan, dan strategis pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan tetap mempertimbangkan kebijakan-kebijakan baru internal maupun eksternal yang signifikan sangat berpengaruh terhadap pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 5 (lima) tahun ke depan.

Berdasarkan analisis asumsi strategis yang dikombinasikan dengan analisis kebijakan, maka prioritas dari asumsi strategis yang dipilih untuk mencapai tujuan pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:

1. Optimalkan kewenangan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan untuk mendukung implementasi kebijakan dan komitmen Gubernur terhadap penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Perangkat Daerah yang efektif, efisien dan profesional berbasis kinerja.
2. Optimalkan tenaga analis jabatan, dan hasil analisa beban kerja secara sinergis untuk mengembangkan penerapan akuntabilitas kinerja di semua Perangkat Daerah Provinsi sebagai upaya mendukung terwujudnya *good governance* dan *clean government*.
3. Manfaatkan kewenangan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
4. Manfaatkan dukungan APBD dalam pelaksanaan tugas-tugas bidang administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
5. Tingkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja guna mengantisipasi adanya tuntutan peningkatan koordinasi pelaksanaan program pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan pendayagunaan aparatur dengan seluruh Perangkat Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

h. Faktor Kunci Keberhasilan

Faktor kunci keberhasilan atau *critical success factors* merupakan capaian kongkret dari prioritas asumsi strategis yang dapat menunjukkan tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan (kinerja) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Pada tataran implementasi operasional, aspek-aspek faktor kunci keberhasilan tersebut substansinya dirinci lebih lanjut di dalam tujuan, sasaran, dan strategi sesuai dengan perubahan-perubahan kebijakan internal maupun eksternal.

Faktor kunci keberhasilan yang diharapkan dapat menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan (kinerja) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tersebut, adalah sebagai berikut :

- a. Penataan Lembaga Perangkat Daerah yang efektif, efisien, dan profesional berbasis kinerja.
- b. Penerapan akuntabilitas kinerja di semua Perangkat Daerah Provinsi melibatkan tenaga analis, staf teknis, dan administrasi.
- c. Peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- d. Pemanfaatan dukungan APBD dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan untuk menyusun pola hubungan kerja antar Perangkat Daerah dan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- e. Peningkatan koordinasi pelaksanaan program pendayagunaan aparatur di seluruh Perangkat Daerah Provinsi didukung oleh peningkatan sarana dan prasarana kerja (kendaraan operasional, ruang kerja, komputer, dll).

Tabel 2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
Digitalisasi Pelayanan	Belum maksimalnya internalisasi SAKIP, Reformasi Birokrasi, Budaya Kerja Sekretariat Daerah	Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang Jasa	-	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi	Kualitas pelayanan publik masih belum optimal	Belum optimalnya Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
	Belum maksimalnya peran serta Perangkat Daerah dalam peningkatan pelayanan publik dan pelaksanaan prosedur tatakerja					
	Belum optimalnya perumusan kebijakan bidang peraturan perundang undangan provinsi, peraturan perundang undangan kabupatenkota, dan bantuan hukum					
	Belum optimalnya efektivitas dalam perumusan kebijakan pengendalian administrasi					

	pelaksanaan pembangunan daerah					
	Belum optimalnya efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa pada Perangkat Daerah					
	Belum Optimalnya tata kelola pelayanan keprotokolan dan penyusunan materi pimpinan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan daerah					
	Belum optimalnya kualitas kebijakan bidang pemerintahan dan otonomi daerah					
	Belum optimalnya perumusan kebijakan Bidang Kebijakan Perekonomian, Sumber Daya Alam dan BUMD dan BLUD					
	Belum optimalnya Rumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat					

Dari tabel di atas, penyimpulan isu strategis dilakukan melalui analisis potensi daerah, permasalahan perangkat daerah, isu lingkungan hidup strategis, serta dinamika global, nasional, dan regional. Hasil analisis menunjukkan beberapa isu utama yang perlu mendapat perhatian.

Pertama, reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan masih belum optimal, ditandai dengan lemahnya internalisasi SAKIP, budaya kerja, serta peran perangkat daerah dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, perumusan kebijakan di berbagai bidang belum efektif, baik dalam penyusunan regulasi, pengendalian administrasi pembangunan, maupun pengadaan barang dan jasa. Ketiga, dukungan terhadap tugas pimpinan daerah masih perlu diperkuat melalui peningkatan kualitas pelayanan keprotokolan dan penyusunan materi pendukung. Keempat, substansi kebijakan daerah pada bidang pemerintahan, perekonomian, sumber daya alam, BUMD/BLUD, dan kesejahteraan rakyat dinilai belum optimal.

Selain itu, dinamika eksternal seperti digitalisasi pelayanan, penerapan prinsip ramah lingkungan, serta agenda nasional reformasi politik, hukum, dan pemberantasan korupsi juga menjadi faktor yang harus diintegrasikan dalam strategi pembangunan daerah. Dengan demikian, isu-isu strategis yang dirumuskan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan program prioritas yang efektif, responsif, dan berkelanjutan.

Tabel 2.2 Sustainable Development Goals (SDGs), atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Indikator SDGs	Program	Kegiatan	Pengampu
16.10.2.(a) Jumlah Badan Publik yang berkualitas Informatif	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	1. Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 2. Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Biro Administrasi Pimpinan
16.3.1.(b) Persentase Orang Miskin yang Menerima Bantuan Hukum Litigasi	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	3. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Biro Hukum
5.6.2* Regulasi yang Menjamin Akses yang Setara bagi Perempuan dan Laki – laki untuk Mendapatkan Pelayanan, Informasi dan Pendidikan terkait	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan 2. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Biro Hukum

Kesehatan Seksual dan Reproduksi			
16.3.1.(c) Persentase Orang Tidak Mampu yang Menerima Layanan Hukum berupa Pos Bantuan Hukum, Sidang di Luar Gedung	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Biro Hukum
16.3.3.(a) Indeks Akses terhadap Keadilan (<i>Access to Justice Index</i>)	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum 2. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Litigasi HAM Non dan	Biro Hukum
16.10.1.(b) Jumlah Penanganan Pengaduan Pelanggaran Hak Asasi Manusia	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Litigasi HAM Non dan	Biro Hukum
16.10.1.(c) Jumlah Penanganan Pengaduan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Perempuan terutama Kekerasan terhadap Perempuan	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Litigasi HAM Non dan	Biro Hukum
16.a.1* Tersedianya Lembaga Hak Asasi Manusia (HAM) Nasional yang Independen yang	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	-	Biro Hukum
16.b.1.(a) Jumlah Kebijakan yang Diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan Pelarangan	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Litigasi HAM Non dan	Biro Hukum

Diskriminasi menurut Hukum HAM		2. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan 3. Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kab/Kota	
12.7.1.(a) Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister dan masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah	Program Kebijakan dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
12.7.1.(b) Jumlah Dokumen Penerapan Label Ramah Lingkungan untuk Pengadaan Barang dan Jasa	Program Kebijakan dan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Biro Pengadaan Barang dan Jasa

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029

Tujuan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel. Renstra ini berfungsi untuk memastikan seluruh kegiatan Sekretariat Daerah selaras dengan visi dan misi pembangunan daerah, serta mendukung pencapaian tujuan strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan secara menyeluruh. Dengan demikian, Renstra Setda menjadi instrumen penting dalam mengarahkan kinerja organisasi menuju peningkatan kualitas pelayanan administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Secara substansial, tujuan Renstra Setda mencakup upaya penguatan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi kebijakan antara perangkat daerah, instansi vertikal, serta pemangku kepentingan lainnya. Hal ini ditujukan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, tujuan Renstra juga diarahkan pada peningkatan kapasitas kelembagaan serta kualitas sumber daya aparatur, sehingga Sekretariat Daerah mampu memberikan dukungan administratif dan teknis yang optimal kepada Gubernur dan Wakil Gubernur dalam perumusan maupun pelaksanaan kebijakan strategis daerah.

Lebih lanjut, Renstra Setda Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025–2029 menitikberatkan pada pencapaian efektivitas layanan perkantoran, manajemen keuangan daerah, serta perencanaan pembangunan yang terintegrasi. Dengan pengelolaan yang tepat, diharapkan tercipta pemerintahan yang adaptif terhadap dinamika pembangunan nasional maupun regional. Pada saat yang sama, Renstra ini juga mendukung terwujudnya sinergi antara program pemerintah pusat

dengan program prioritas daerah, sehingga pembangunan di Kalimantan Selatan dapat berlangsung secara berkelanjutan, merata, dan berkeadilan.

3.2 Sasaran Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029

Sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025–2029 dirumuskan sebagai wujud operasionalisasi dari tujuan strategis yang telah ditetapkan. Sasaran ini pada dasarnya merupakan hasil yang ingin dicapai secara terukur dalam kurun waktu lima tahun, baik dalam aspek kinerja organisasi, kualitas pelayanan administrasi pemerintahan, maupun dukungan terhadap pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Dengan adanya sasaran yang jelas, setiap program dan kegiatan Setda diharapkan dapat lebih terarah, terukur, dan selaras dengan agenda prioritas pembangunan daerah.

Secara umum, sasaran Renstra Setda Kalimantan Selatan difokuskan pada peningkatan kapasitas tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Hal ini mencakup terwujudnya kualitas perumusan kebijakan daerah yang berbasis data dan evidence-based, peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah, serta optimalisasi pelayanan administrasi yang mendukung pelaksanaan tugas kepala daerah. Selain itu, sasaran juga diarahkan pada penguatan fungsi fasilitasi dan koordinasi pembangunan, sehingga setiap kebijakan dapat terimplementasi dengan baik serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Di samping itu, sasaran strategis Renstra Setda turut menekankan pada peningkatan kualitas sumber daya aparatur, baik dari segi kompetensi, integritas, maupun etos kerja. Aparatur yang profesional dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi menjadi salah satu kunci dalam menjawab tantangan pemerintahan modern di era digital. Dengan demikian, sasaran tidak hanya difokuskan pada aspek kelembagaan, tetapi juga pada pengembangan kualitas SDM aparatur yang akan menjadi penggerak utama birokrasi.

Lebih lanjut, sasaran Renstra Setda juga diarahkan pada penguatan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja yang transparan dan akuntabel. Hal ini penting untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun substantif. Dengan adanya sistem pengawasan dan evaluasi yang baik, maka kinerja Sekretariat Daerah akan semakin selaras dengan prinsip good governance, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian visi pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025–2029.

Tabel 3.3 Tujuan dan Sasaran PD

NSPK SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR			TARGET TAHUN						KET
				SATUAN	BASELINE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah dan profesionalitas ASN	Meningkatnya Pencapaian Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan		Nilai Reformasi Birokrasi General	Angka	74,40	74.41	74.50	74.56	74.60	74.64	74.70	
			Nilai Reformasi Birokrasi Tematik	Angka	10,25	10.27	10.32	10.40	10.50	10.60	10.69	
			Persentase Perangkat Daerah dan Biro dengan Capaian Kinerja Organisasi minimal kategori Baik	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	

			Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah	Indeks	95	95	95.1	95.2	95.3	95.4	95.5	
			Indeks Pelayanan Publik Sekretariat Daerah	Indeks	4,01	4.01	4.1	4.2	4.3	4.4	4.51	
			Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	Angka	85	90.01	90.02	90.03	90.04	90.05	90.06	
			Indeks Maturitas SPIP Sekretariat Daerah	Angka	3	3.00	03.09	3.18	3.30	3.45	3.60	

		Meningkatkan Kinerja Biro dan Perangkat Daerah di Bawah Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Perangkat Daerah dan Biro di bawah koordinasi Asisten bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan capaian IKU minimal 85%	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatkan Kinerja Biro dan Perangkat Daerah di Bawah Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Perangkat Daerah dan Biro di bawah koordinasi Asisten bidang Perekonomian dan Pembangunan dengan capaian IKU minimal 85%	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	

		Meningkatkan Kinerja Biro dan Perangkat Daerah di Bawah Koordinasi Bidang Administrasi Umum	Persentase Perangkat Daerah dan Biro di bawah koordinasi Asisten bidang Administrasi Umum dengan capaian IKU minimal 85%	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
--	--	---	--	------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

3.3 Strategi Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029

Berdasarkan RPJMD 2025 – 2029 strategi Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan keagamaan (Biro Kesra)
2. Mewujudkan Aparatur Pemerintahan yang Profesional dan meningkatkan kualitas Administrasi Kebijakan Pemerintahan yang Akuntabel (Biro Pemerintahan & Otda)
3. Peningkatan Kualitas Manajemen Pelayanan Publik dan Kualitas Sistem Manajemen Kinerja Pemerintah Daerah (Biro Organisasi).
4. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan kebijakan pengendalian administrasi pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Selatan (Biro Adbang).
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik (Biro Administrasi Pimpinan).
6. Meningkatkan tata kelola layanan keprotokolan dan penyusunan materi komunikasi pimpinan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan daerah (Biro Administrasi Pimpinan)
7. Mewujudkan layanan hukum yang berkualitas dan akuntabel melalui pembentukan produk hukum daerah, bantuan/layanan hukum daerah dan informasi produk hukum (Biro Hukum)
8. Meningkatkan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Minimal Sangat Baik (Biro PBJ)
9. Pengembangan iklim penanaman modal (Biro Perekonomian)
10. Menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting (Biro Perekonomian)
11. Meningkatkan kinerja BUMD untuk mendorong kontribusi terhadap Pendapatan Daerah (Biro Perekonomian)
12. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Bidang Ekonomi melalui Penguatan Peran BLUD (Biro Perekonomian)
13. Meningkatkan pelayanan terhadap Stakeholder Eksternal dan Internal Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Biro Umum).

Tabel 3.4 Pentahapan Renstra PD

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia
Meningkatkan Kualitas Pelaporan dan Analisis Pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah	Meningkatkan Kualitas Pelaporan dan Analisis Pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah	Meningkatkan Kualitas Pelaporan dan Analisis Pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah	Meningkatkan Kualitas Pelaporan dan Analisis Pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah	Meningkatkan Kualitas Pelaporan dan Analisis Pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah
Meningkatkan Kualitas Pembinaan, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penataan Organisasi	Meningkatkan Kualitas Pembinaan, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penataan Organisasi	Meningkatkan Kualitas Pembinaan, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penataan Organisasi	Meningkatkan Kualitas Pembinaan, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penataan Organisasi	Meningkatkan Kualitas Pembinaan, Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Penataan Organisasi
Penguatan Perencanaan Pengadaan Barang dan jasa	Digitalisasi Proses Pengadaan Barang dan Jasa	Pengembangan SDM Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa	Kolaborasi dan Sinergi terkait Pengadaan Barang dan Jasa	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Resiko terkait Pengadaan Barang dan Jasa
Pemutakhiran data BUMD, BLUD, dan harga komoditas. Penyusunan baseline dan penguatan tim.	Pembinaan tata kelola, SDM, dan koordinasi lintas sektor	Fasilitasi digitalisasi pelaporan, survei IKM, dan monitoring inflasi	Penerapan ulang praktik efektif dan pemantauan berkelanjutan.	Evaluasi capaian dan integrasi hasil ke kebijakan jangka panjang

3.4 Arah Kebijakan Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2025-2029

- 1.** Peningkatan pembinaan kerukunan umat beragama (Biro kesra).
- 2.** Peningkatan Koordinasi Kebijakan bidang Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar (Biro Kesra)
- 3.** Peningkatan Koordinasi Kebijakan bidang Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar (Biro Kesra)
- 4.** Meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan terhadap Kinerja Biro dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan (EPD) Kalimantan Selatan (Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah).
- 5.** Mendorong Pengembangan kualitas sistem Informasi Kinerja Pemerintah Daerah.(organisasi)
- 6.** Penerapan Prinsip-prinsip Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance) (organisasi)
- 7.** Mempercepat penyelesaian masalah Pelaksanaan Pembangunan Daerah dengan kebijakan mendorong percepatan pelaksanaan proyek prioritas nasional dan daerah (Adbang)
- 8.** Peningkatan kualitas tata kelola sistem pelayanan publik (Adpim)
- 9.** Mewujudkan tata kelola layanan keprotokolan dan penyusunan materi komunikasi pimpinan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan daerah (Biro Administrasi Pimpinan)
- 10.** Terwujudnya kualitas Prodak hukum Daerah, Bantuan Hukum dan HAM serta Layanan Hukum dan Informasi Produk Hukum (Biro Hukum).
- 11.** Mengoptimalkan dalam Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Layan Pengadaan Secara Elektronik, dan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (Biro PBJ)
- 12.** Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (PBJ)
- 13.** Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)
- 14.** Peningkatan pemberian fasilitas di bidang penanaman modal (Biro Perekonomian).

- 15.** Pengendalian harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting (Biro Perekonomian).
- 16.** Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Kinerja BUMD secara terencana dan berkelanjutan (Biro Perekonomian)
- 17.** Mengembangkan system evaluasi kualitas pelayanan BLUD berbasis hasil Survei Kepuasan Masyarakat (Biro Perekonomian)
- 18.** Memperkuat peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui pemantauan harga dan distribusi komoditas strategis (Biro Perekonomian)
- 19.** Meningkatkan Pelayanan terhadap kerumahtanggaan daerah, ketatausahaan dan administrasi kepegawaian serta perencanaan keuangan aset di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Umum).

Tabel 3.5 Arah Kebijakan Renstra PD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Melaksanakan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi, pembinaan teknis administrasi dan sumber daya, pemantauan dan evaluasi program kegiatan serta penyelenggaraan dukungan pengadaan barang dan jasa	Meningkatkan penataan regulasi, termasuk proses praregulasi yang memadai di daerah	Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah, Bantuan Hukum, Layanan Hukum dan Layanan Informasi Hukum	
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran Prioritas Nasional	Meningkatnya kepatuhan PD terhadap prosedur dan tatakerja	
			Meningkatkan Efektivitas pelaksanaan kebijakan pengendalian administrasi pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Selatan	
		Meningkatkan pencegahan dan pemberantasan korupsi	Meningkatnya efektifitas pengadaan barang dan jasa SKPD Di Provinsi Kalimantan Selatan	
		Meningkatkan kualitas pengawasan proses implementasi budaya birokrasi BerAKHLAK dengan pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatnya Internalisasi RB di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	

		Meningkatkan kualitas pelayanan publik masyarakat, termasuk kecepatan respon terhadap laporan masyarakat	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Pemprov Kalsel	
			Meningkatkan Efektifitas Koordinasi Lingkup Perekonomian	
			Meningkatkan Tata Kelola Layanan Keprotokolan, Materi dan Komunikasi pimpinan yang responsif dan terintegrasi untuk memperkuat akuntabilitas kebijakan dan kegiatan pimpinan	
			Meningkatnya koordinasi dan fasilitasi bidang Kesejahteraan Rakyat	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan yang telah disusun pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah Rencana Strategis (RENSTRA) yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2025-2029), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan tetap mengacu pada program pembangunan yang tertuang dalam RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029.

Pada hakekatnya, program disusun berdasarkan bidang masalah yang merupakan acuan bagi penyusunan program Sekretariat Daerah pada periode lima tahun ke depan (2025-2029). Masing-masing program pembangunan lebih lanjut dijabarkan ke dalam berbagai kegiatan. Secara rinci kegiatan dari masing-masing program pembangunan untuk Sekretariat Daerah serta pendanaan indikatif per Tahun 2025-2029 adalah seperti terlihat pada Lampiran

Kegiatan strategis yang tercakup dalam program-program tersebut, merupakan program Sekretariat Daerah Provinsi yang harus dijabarkan menjadi Rencana Kinerja (Renja) Biro-Biro Sekretariat Daerah dengan memperhatikan isu-isu strategis dari perubahan lingkungan strategis, masalah, tantangan dan peluang yang dapat mempengaruhi pembangunan dan arah pembangunan serta pengembangannya. Prioritas program tersebut memperhatikan juga ketersediaan tenaga profesional, dana, fasilitas dan keunggulan komparatif dan kompetitif Sekretariat Daerah Provinsi dan jajarannya.

Rencana Program yang akan dilaksanakan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan untuk mendukung pencapaian target pembangunan berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 sebanyak 8 Program Kerja Pembangunan yang terdiri atas 1 program rutin dan 7 program non rutin.

- a) Program Rutin
 - 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
- b) Program Non Rutin
 - 1. Program Perekonomian dan Pembangunan (Biro Perekonomian)
 - 2. Program Penataan Organisasi (Biro Organisasi)
 - 3. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (Biro PBJ)
 - 4. Program Kesejahteraan Rakyat (Biro Kesra)
 - 5. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Biro Pemerintahan)
 - 6. Program Dasilitasi dan Koordinasi Hukum (Biro Hukum)
 - 7. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan (Biro Adbang)

4.2 Uraian Kegiatan

- a) Program Rutin (Biro Umum & Biro Administrasi Pimpinan)
 - 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - e. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- h. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - i. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - j. Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan
 - k. Fasilitasi Keprotokolan
- b) Program Non Rutin
- 1. Program Perekonomian dan Pembangunan (Biro Perekonomian)
 - a. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian
 - b. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam
 - c. Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD
 - 2. Program Penataan Organisasi (Biro Organisasi)
 - a. Fasilitasi Penataan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
 - b. Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja
 - 3. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (Biro PBJ)
 - a. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
 - b. Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
 - c. Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
 - 4. Program Kesejahteraan Rakyat (Biro Kesra)
 - a. Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual
 - b. Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar
 - c. Fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar
 - 5. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Biro Pemerintahan)
 - a. Pelaksanaan Tugas Pemerintahan
 - b. Pelaksanaan Otonomi Daerah
 - c. Fasilitasi Kerja Sama
 - 6. Program Dasilitasi dan Koordinasi Hukum (Biro Hukum)
 - a. Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan

- b. Fasilitas Bantuan Hukum
- 7. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan (Biro Adbang)
 - a. Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
 - b. Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Tabel 4.2 Teknis Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra PD

NSPK/SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)			(8)
	Meningkatnya Pencapaian Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan				Nilai Reformasi Birokrasi General				
					Nilai Reformasi Birokrasi Tematik				
					Persentase Perangkat Daerah dan Biro dengan capaian kinerja organisasi minimal kategori baik				

					Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah				
					Indeks Pelayanan Publik Sekretariat Daerah				
					Nilai SAKIP Sekretariat Daerah				
					Indeks Maturitas SPIP Sekretariat Daerah				
		Meningkatkan Kinerja Biro dan Perangkat Daerah di Bawah Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat			Persentase Perangkat Daerah dan Biro di bawah koordinasi Asisten bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dengan capaian IKU minimal 85%				
			Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintah dalam pembinaan mental		Tingkat Kondusifitas Kerukunan Umat Beragama	Program Kesejahteraan Rakyat			

			spiritual, dan kesejahteraan rakyat						
					Persentase Peningkatan Pengumpulan Zakat, Infak, dan Sadakah (ZIS)				
					Persentase Kebijakan di Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar, dan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang ditindaklanjuti				
				Meningkatnya Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual	Persentase Fasilitas Rumusan Kebijakan yang menghasilkan Kebijakan Bidang Bina Mental Spiritual		Fasilitas Pembinaan Mental Spiritual		
					Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola			Pengelolaan sarana dan prasarana spiritual	

					Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi			Fasilitasi kelembagaan bina spiritual	
				Meningkatnya Fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar	Persentase Fasilitasi Rumusan Kebijakan yang menghasilkan Kebijakan Bidang Pelayanan Dasar		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar		
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan			Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan			Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	

					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial			Fasilitas, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	
				Meningkatnya Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Persentase Fasilitas Rumusan Kebijakan yang menghasilkan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar		Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar		
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata			Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	

					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja			Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan			Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	

			Meningkatnya kualitas produk hukum Daerah, bantuan hukum Daerah, serta koordinasi dan fasilitasi bidang hukum		Persentase Produk Hukum Daerah Yang Ditetapkan	Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum			
					Persentase Pemenuhan Bantuan Hukum Pemerintah Daerah				
					Indeks Reformasi Hukum (IRH)				
					Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)				
				Tercapainya Kualitas Dan Efektifitas Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan Provinsi Dan Kabupaten/Kota	Persentase Peraturan Perundang-Undangan Provinsi Yang Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan;		Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan		

					Persentase Peraturan Perundang-Undangan Kab/Kota Yang Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan				
				Tersedianya Produk Hukum Daerah yang Terpublikasi dengan baik	Persentase Peraturan Perundang-Undangan Provinsi Yang Terpublikasi				
					Jumlah Produk Hukum yang disusun			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	
					Jumlah Produk Hukum Penetapan yang disusun			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	
					Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya			Pendokumentasian Produk Hukum Dan Naskah Hukum Lainnya	
					Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang difasilitasi dan dievaluasi			Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	

				Terselesaikan nya Fasilitas Masalah Hukum (Litigasi) Dan (Non Litigasi & HAM)	Persentase Bantuan/Layanan Hukum Litigasi Di Pengadilan yang diberikan		Fasilitas Bantuan Hukum		
					Persentase Bantuan/Layanan Hukum Non Litigasi Di Luar Pengadilan & P5 HAM Kab/Kota yang diberikan				
					Jumlah Masalah Hukum yang Ddselesaikan			Fasilitas Penyelesaian Masalah Hukum	
					Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang diselesaikan			Fasilitas Penyelesaian Masalah Non Litigasi Dan HAM	

			Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama		Nilai Rata-rata Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah			Nilai rata-rata kebijakan bidang pem dan Otda = (Nilai LPPD + Nilai SPM + Nilai Kerjasama + Nilai Penyelesaian Batas Daerah dan Konflik Pertanahan)/4 Nilai LPPD sesuai Hasil Dagri Nilai SPM sesuai Hasil Dagri Nilai Kerjasama = = Persentase Fasilitas Rumusan Kebijakan yang menghasilkan Kebijakan Bidang Kerja Sama
--	--	--	---	--	---	---	--	--	--

									Nilai Penyelesaian Batas Daerah dan Konflik = Persentase Fasilitasi Rumusan Kebijakan yang menghasilkan Kebijakan Bidang Pemerintahan
					Nilai LPPD				
					Persentase Realisasi Capaian SPM				
				Meningkatnya Fasilitasi Bidang Pemerintahan	Persentase Fasilitasi Rumusan Kebijakan yang menghasilkan Kebijakan Bidang Pemerintahan		Pelaksanaan Tugas Pemerintahan		

					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan			Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penataan Wilayah			Fasilitasi Penataan Wilayah	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pemerintahan Umum			Fasilitasi Pemerintahan Umum	
				Meningkatnya Fasilitasi Bidang Otonomi Daerah	Persentase Fasilitasi Rumusan Kebijakan yang menghasilkan Kebijakan Bidang Otonomi Daerah		Pelaksanaan Otonomi Daerah		
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD			Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	

					Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang dilaksanakan			Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan			Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	
				Meningkatnya Fasilitasi Bidang Kerja Sama	Persentase Fasilitasi Rumusan Kebijakan yang menghasilkan Kebijakan Bidang Kerja Sama		Fasilitasi Kerja Sama		
					Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang difasilitasi			Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	
					Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang difasilitasi			Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	

					Jumlah Kerja Sama yang dievaluasi			Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	
		Meningkatkan Kinerja Biro dan Perangkat Daerah di Bawah Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan			Persentase Perangkat Daerah dan Biro di bawah Koordinasi Asisten bidang Perekonomian dan Pembangunan dengan capaian IKU minimal 85%				
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan		Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan			
				Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Rekomendasi masalah Pelaksanaan Pembangunan Daerah sumber Dana APBD dan APBN yang ditindaklanjuti oleh stakeholder		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah		

					Jumlah Laporan hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	
				Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Persentase Rekomendasi masalah Pelaksanaan Pembangunan Wilayah yang ditindaklanjuti oleh stakeholder		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah		
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah I, II dan III			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	

				Meningkatnya Pengendalian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase Permasalahan Pembangunan Daerah yang dianalisa dan dirumuskan sebagai bahan kebijakan pembangunan daerah		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah		
					Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang disediakan			Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	
					Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah			Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah dokumen hasil perumusan kebijakan pembangunan daerah			Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	
			Meningkatnya Dividen yang disetorkan oleh BUMD kepada		Persentase Peningkatan Dividen BUMD yang disetorkan ke Pemerintah Provinsi	Program Perekonomian dan Pembangunan			

			pemerintah provinsi						
			Terwujudnya BLUD dengan nilai IKM sangat baik		Persentase BLUD dengan Nilai IKM/SKM sangat Baik				
			Terjaganya kestabilan inflasi		Tingkat Inflasi				
				Meningkatnya Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Persentase Analisis Ekonomi yang Ditindaklanjuti		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian		
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro			Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	

					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro			Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	
				Meningkatnya Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Persentase Analisis Sumber Daya Alam yang ditindaklanjuti		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam		
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	

				Meningkatnya Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Persentase Analisis BUMD dan BLUD yang ditindaklanjuti		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD		
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha			Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi			Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah			Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	

			Meningkatnya Efektifitas Pengadaan Barang dan Jasa SKPD di Provinsi Kalimantan Selatan		Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa			
					Rasio Nilai Belanja yang dilakukan melalui Pengadaan				
				Meningkatnya kualitas kelembagaan UKPBJ Provinsi Kalimantan Selatan dan kualitas SDM Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase UKPBJ Provinsi Kab/Kota dengan tingkat kematangan minimal level 3		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		
					Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa			Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	

					Persentase SDM pengelola Pengadaan Barang dan Jasa yang berkompeten				
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa			Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa	
				Meningkatnya kualitas layanan konsultasi pendampingan dan bimtek PBJ	Persentase terpenuhinya layanan permasalahan pengadaan barang dan jasa				
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa			Pendampingan, Konsultasi dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	
				Terwujudnya proses pengadaan barang dan jasa sesuai kebutuhan daerah	Persentase proses pengadaan barang dan jasa Provinsi Kalimantan Selatan yang sesuai ketentuan perundang-undangan dan tepat waktu		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		

					Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa			Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	
					Persentase pengadaan barang dan jasa dengan hasil evaluasi bebas mark up				
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa			Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	
					Persentase belanja yang dilakukan melalui pengadaan				
					Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa			Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	

				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik yang sesuai ketentuan	Persentase Pemenuhan Layanan Pengadaan secara Elektronik yang sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik		
					Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik			Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	
					Rasio Gangguan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik yang dapat diselesaikan				
					Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa			Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	
					Persentase Pemenuhan Pelayanan dalam memberi Informasi seputar Pengadaan Barang dan Jasa				

					Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa			Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	
		Meningkatkan Kinerja Biro dan Perangkat Daerah di Bawah Koordinasi Bidang Administrasi Umum			Persentase Perangkat Daerah dan Biro di bawah koordinasi Asisten bidang Administrasi Umum dengan capaian IKU minimal 85%				
			Meningkatnya Internalisasi RB di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan		Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan RB dengan Baik	Program Penataan Organisasi			
				Meningkatnya kualitas penerapan RB di Perangkat Daerah	Persentase perangkat daerah yang mampu membuat dan melaksanakan Rencana Aksi RB General yang berkualitas		Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja		
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi			Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	

			Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja pemerintah daerah dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Nilai Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				
					Persentase Perangkat Daerah dengan Kualifikasi nilai SAKIP minimal AA				
				Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja perangkat daerah	Persentase perangkat daerah dengan nilai pelaporan kinerja minimal 13 poin		Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja		
					Persentase perangkat daerah yang tertib menyampaikan laporan kinerja bulanan dan tahunan				
					Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja			Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	

			Meningkatnya Budaya Kerja Perangkat Daerah		Indeks BerAKHLAK Perangkat Daerah				
				Meningkatnya penerapan budaya kerja perangkat daerah	Persentase perangkat daerah yang menerapkan budaya kerja dengan baik		Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja		
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja			Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	
			Terbentuknya kelembagaan yang sesuai ketentuan di wilayah Provinsi Kalsel		Indeks Kelembagaan Provinsi				
				Terlaksananya pembinaan dan evaluasi kelembagaan provinsi dan kab/kota	Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang dilaksanakan Evaluasi kelembagaannya		Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan		

					Persentase Kab/Kota yang di laksanakan Evaluasi kelembagaan nya				
					Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota			Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota			Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya Perangkat Daerah dengan Dokumen Analisis Jabatan Lengkap	Persentase Perangkat Daerah dengan dokumen analisis jabatan lengkap		Fasilitasi Kelembagaa n dan Analisis Jabatan		
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota			Penataan Analisis Jabatan	

			Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan		Jumlah Unit Pelayanan Publik dengan Pelayanan Publik Prima (Nilai A)				
				Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah terhadap peraturan pelayanan publik	Persentase Perangkat Daerah dengan kriteria pelayanan publik "Baik"		Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja		
					Nilai Rata-rata SKM Perangkat Daerah Prov. Kalsel				
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik			Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	
			Meningkatnya ketatalaksanaan Pemerintah Provinsi		Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Tata Laksana dengan "Baik"				

					Jumlah Dokumen Proses Bisnis Pemda				
					Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Proses Bisnis				
				Terlaksananya Pembinaan Tata Laksana Provinsi Kalimantan Selatan	Persentase Perangkat Daerah patuh SOP		Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja		
					Persentase PD yang memiliki dokumen rancangan probis (indikator Tahun 2026)				
					Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan peta proses bisnis (indikator Tahun 2027-2030)				

					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan			Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	
			Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah		Persentase Kegiatan Tepat Waktu	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
					Persentase Laporan/Telaahan Staf Tepat Waktu				
					Nilai Kepatuhan Pengelolaan Administrasi Internal				
					Persentase Aduan/Keluhan antar Bidang terkait Layanan Sekretariat				

					Persepsi Internal antar Bidang/Unit terhadap Layanan Sekretariat				
				Meningkatnya Persentase Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang baik	Persentase Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang baik		Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja		
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah			Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
				Meningkatnya Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang baik	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang baik		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	

					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Meningkatnya Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang baik	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang baik		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	

				Meningkatnya Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	Persentase Administraasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang baik		Administrasi Kepegawaia n Perangkat Daerah		
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan			Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	

					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Meningkatnya Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang baik	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang baik		Administrasi Umum Perangkat Daerah		
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	

					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	

				Meningkatnya Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Baik	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Baik		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Meningkatnya Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang baik		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		

				Daerah yang baik					
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

				Meningkatnya Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang baik	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang baik		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara			Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi			Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	
				Terlaksananya Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah		

					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
			Meningkatnya Tata Kelola Layanan Keprotokolan dan Penyusunan Materi Komunikasi Pimpinan untuk Mendukung Kelancaran Pelaksanaan tugas Pimpinan Daerah		Persentase Pemenuhan Layanan Keprotokolan dan Materi Komunikasi Pimpinan yang diselesaikan tepat waktu				
				Tercapainya Kualitas Bahan Materi dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Tercapainya Kualitas Bahan Materi dan Komunikasi Pimpinan		Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan		

					Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan			Penyiapan Materi Pimpinan	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan			Fasilitas Komunikasi Pimpinan	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan			Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	
				Tercapainya Kualitas Fasilitas Keprotokolan	Persentase Tercapainya Kualitas Fasilitas Keprotokolan		Fasilitas Keprotokolan		
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara			Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			Fasilitas Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	

					Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan			Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	
--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------	--

4.3 Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif

Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Pendanaan menggambarkan arah kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam periode perencanaan. Tabel ini menyajikan keterkaitan antara bidang urusan, indikator kinerja, serta target capaian tahunan yang diukur melalui outcome dan output. Selain itu, tabel memuat baseline, target kinerja, serta alokasi pagu indikatif untuk setiap tahun mulai 2025 hingga 2029. Dengan demikian, tabel ini berfungsi sebagai instrumen utama dalam memastikan konsistensi perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian program pembangunan daerah secara terukur dan akuntabel. Sub kegiatan beserta kinerja, indikator , target dan pagu indikatif yang akan dilaksanakan pada Renstra Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2025-2029 akan di uraikan pada tabel berikut :

Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN					INDIKATOR / OUTCOME / OUTPUT	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												KET
								2025		2026		2027		2028		2029		2030		
								TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)					(2)		(3)			(4)		(5)		(6)		(7)		(8)		(9)
	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT								Rp84,741,700,000		Rp67,652,132,400		Rp67,902,445,290		Rp69,219,752,729		Rp69,967,326,058		Rp70,785,943,773	
		Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah dalam Pembinaan Mental Spiritual, dan Kesejahteraan Rakyat			Tingkat Kondusifitas Kerukunan Umat Beragama	Poin	74.01	74.03	Rp84,741,700,000	74.7	Rp67,652,132,400	75.10	Rp67,902,445,290	75.51	Rp69,219,752,729	75.91	Rp69,967,326,058	76.32	Rp70,785,943,773	
					Persentase Peningkatan Pengumpulan Zakat, Infak, dan Sadakah (ZIS)	Persen	32	32		33		34		35		37		38		

					Persentase Kebijakan di Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar, dan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar yang ditindaklanjuti	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
			Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Meningkatnya Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	Persentase fasilitasi rumusan kebijakan yang menghasilkan kebijakan bidang bina mental spiritual	Persen	100	100	Rp68,017,920,000	100	Rp52,102,132,400	100	Rp52,294,910,290	100	Rp53,309,431,550	100	Rp53,885,173,410	100	Rp54,515,629,939	
				Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	Unit	300	320	Rp42,808,960,000	300	Rp26,302,132,400	350	Rp26,399,450,290	370	Rp26,911,599,626	400	Rp27,202,244,901	420	Rp27,520,511,167	
				Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	Unit	170	200	Rp25,208,960,000	200	Rp25,800,000,000	250	Rp25,895,460,000	275	Rp26,397,831,924	300	Rp26,682,928,509	320	Rp26,995,118,772	
			Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar	Meningkatnya Fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar	Persentase fasilitasi rumusan kebijakan yang menghasilkan kebijakan bidang pelayanan dasar	Persen	100	100	Rp14,848,780,000	100	Rp14,550,000,000	100	Rp14,603,835,000	100	Rp14,887,149,399	100	Rp15,047,930,613	100	Rp15,223,991,401	
				Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Dokumen	1	1	Rp13,555,420,000	1	Rp13,250,000,000	1	Rp13,299,025,000	1	Rp13,557,026,085	1	Rp13,703,441,967	1	Rp13,863,772,238	
				Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Dokumen	1	1	Rp993,360,000	1	Rp1,000,000,000	1	Rp1,003,700,000	1	Rp1,023,171,780	1	Rp1,034,222,035	1	Rp1,046,322,433	
				Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Dokumen	1	1	Rp300,000,000	1	Rp300,000,000	1	Rp301,110,000	1	Rp306,951,534	1	Rp310,266,611	1	Rp313,896,730	
			Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Meningkatnya Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar	Persentase fasilitasi rumusan kebijakan yang menghasilkan kebijakan bidang kesra non pelayanan dasar	Persen	100	100	Rp1,875,000,000	100	Rp1,000,000,000	100	Rp1,003,700,000	100	Rp1,023,171,780	100	Rp1,034,222,035	100	Rp1,046,322,433	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Dokumen	1	1	Rp1,275,000,000	1	Rp400,000,000	1	Rp401,480,000	1	Rp409,268,712	1	Rp413,688,814	1	Rp418,528,973	
				Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Dokumen	1	1	Rp300,000,000	1	Rp300,000,000	1	Rp301,110,000	1	Rp306,951,534	1	Rp310,266,611	1	Rp313,896,730	

				Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Dokumen	1	1	Rp300,000,000	1	Rp300,000,000	1	Rp301,110,000	1	Rp306,951,534	1	Rp310,266,611	1	Rp313,896,730	
	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI								Rp3,624,118,400		Rp3,014,602,100		Rp3,025,756,128		Rp3,084,455,797		Rp3,117,767,919		Rp3,154,245,804	
		Meningkatnya Budaya Kerja Perangkat Daerah			Indeks BERAKHLAK Perangkat Daerah	Indeks	-	-	Rp282,146,400	79.50	Rp234,695,700	79.70	Rp235,564,074	80	Rp240,134,017	80	Rp242,727,465	80	Rp245,567,376	
			Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya penerapan budaya kerja perangkat daerah	Persentase perangkat daerah yang menerapkan budaya kerja dengan baik	Persen	100	100	Rp282,146,400	100	Rp234,695,700	100	Rp235,564,074	100	Rp240,134,017	100	Rp242,727,465	100	Rp245,567,376	
				Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Laporan	1	1	Rp282,146,400	1	Rp234,695,700	1	Rp235,564,074	1	Rp240,134,017	1	Rp242,727,465	1	Rp245,567,376	
		Meningkatnya internalisasi RB di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan			Persentase perangkat daerah yang menerapkan RB dengan baik	Persen	100	100	Rp376,946,400	100	Rp313,552,600	100	Rp314,712,745	100	Rp320,818,172	100	Rp324,283,008	100	Rp328,077,119	

			Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya kualitas penerapan RB di Perangkat Daerah	Persentase perangkat daerah yang mampu membuat dan melaksanakan Rencana Aksi RB General yang berkualitas	Persen	100	100	Rp376,946,400	100	Rp313,552,600	100	Rp314,712,745	100	Rp320,818,172	100	Rp324,283,008	100	Rp245,567,376	
				Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan reformasi birokrasi	Dokumen	1	1	Rp376,946,400	1	Rp313,552,600	1	Rp314,712,745	1	Rp320,818,172	1	Rp324,283,008	1	Rp328,077,119	
		Meningkatnya kualitas ketatalaksanaan Pemprov Kalsel			Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Tata Laksana dengan "Baik"	Persen	80	80	Rp891,796,800	82	Rp741,816,900	84	Rp744,561,623	86	Rp759,006,118	88	Rp767,203,384	90	Rp776,179,664	
					Jumlah dokumen proses bisnis pmda	Dokumen	1	-		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Proses Bisnis	Persen	100	-		-	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
			Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Terlaksananya Pembinaan Tata Laksana Provinsi Kalimantan Selatan	Persentase Perangkat Daerah patuh SOP	Persen	100	100	Rp891,796,800	100	Rp741,816,900	100	Rp744,561,623	100	Rp759,006,118	100	Rp767,203,384	100	Rp776,179,664	
					Persentase PD yang memiliki dokumen rancangan probis (indikator Tahun 2026)	Persen	-	-		100		-		-		-		-		

					Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan peta proses bisnis (indikator Tahun 2027-2030)	Persen	-	-		-		100		100		100		100	
				Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Dokumen	1	1	Rp891,796,800	1	Rp741,816,900	1	Rp744,561,623	1	Rp759,006,118	1	Rp767,203,384	1	Rp776,179,664
		Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja pemerintah daerah dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah			Nilai laporan kinerja pemerintah daerah	Point	12.34	12.5	Rp502,570,500	12.55	Rp418,049,700	12.6	Rp419,596,484	13	Rp427,736,656	13	Rp432,356,212	13	Rp437,414,779
					Persentase perangkat daerah dengan kualifikasi Nilai SAKIP minimal AA	Persen	4.25	19.00		28.57		38.77		49		59.18		69	
			Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya kualitas pelaporan kinerja perangkat daerah	Persentase perangkat daerah dengan nilai pelaporan kinerja minimal 13 poin	Persen	-	-	Rp502,570,500	80	Rp418,049,700	100	Rp419,596,484	100	Rp427,736,656	100	Rp432,356,212	100	Rp437,414,779
					Persentase perangkat daerah yang tertib menyampaikan laporan kinerja bulanan dan tahunan	Persen	100	100		100		85		90		100		100	

				Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Dokumen	1	1	Rp502,570,500	1	Rp418,049,700	1	Rp419,596,484	1	Rp427,736,656	1	Rp432,356,212	1	Rp437,414,779	
		Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah			Jumlah Unit Pelayanan Publik dengan Pelayanan Publik Prima (Nilai A)	Unit	3	4	Rp292,175,000	5	Rp243,016,000	6	Rp243,915,159	7	Rp248,647,113	8	Rp251,332,502	9	Rp254,273,092	
			Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya kepatuhan Perangkat Daerah terhadap peraturan pelayanan publik	Persentase Perangkat Daerah dengan kriteria pelayanan publik "Baik"	Point	85	92	Rp292,175,000	93	Rp243,016,000	94	Rp243,915,159	95	Rp248,647,113	96	Rp251,332,502	98	Rp254,273,092	
					Nilai Rata-rata SKM Perangkat Daerah Prov. Kalsel	Point	90	90		95		96		97		98		99		
				Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Dokumen	1	1	Rp292,175,000	1	Rp243,016,000	1	Rp243,915,159	1	Rp248,647,113	1	Rp251,332,502	1	Rp254,273,092	
		Terbentuknya kelembagaan yang sesuai ketentuan di wilayah Provinsi Kalsel			Indeks Kelembagaan Provinsi	Indeks	-	-	Rp1,278,483,300	82.3	Rp1,063,471,200	83	Rp1,067,406,043	83	Rp1,088,113,721	83	Rp1,099,865,349	83	Rp1,112,733,773	

			Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Terlaksananya pembinaan dan evaluasi kelembagaan provinsi dan kab/kota	Persentase Kab/Kota yang di laksanakan Evaluasi kelembagaannya	Persen	100	100	Rp1,036,833,300	100	Rp862,461,600	100	Rp865,652,708	100	Rp882,446,371	100	Rp891,976,791	100	Rp902,412,920	
					Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang dilaksanakan Evaluasi kelembagaannya	Persen	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100		
				Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan provinsi	Dokumen	1	1	Rp811,792,500	1	Rp675,267,500	1	677,765,990	1	Rp690,914,650	1	698,376,528	1	Rp706,547,534	
				Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	Rp225,040,800	1	Rp187,194,100	1	187,886,718	1	Rp191,531,721	1	193,600,263	1	Rp195,865,386	
			Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Tersusunnya Perangkat Daerah dengan Dokumen Analisis Jabatan Lengkap	Persentase Perangkat Daerah dengan dokumen analisis jabatan lengkap	Persen	70	70	Rp241,650,000	100	Rp201,009,600	100	Rp201,753,336	100	Rp205,667,350	100	Rp207,888,558	100	Rp210,320,854	
				Penataan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	Dokumen	4	4	Rp241,650,000	4	Rp201,009,600	4	Rp201,753,336	4	Rp205,667,350	4	Rp207,888,558	4	Rp210,320,854	
	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN								Rp1,483,257,000		Rp864,744,700		Rp867,944,255		Rp884,782,374		Rp894,338,024		Rp904,801,778	

		Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan			Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan	Persen	-	-	Rp1,483,257,000	100	Rp864,744,700	100	Rp867,944,255	100	Rp884,782,374	100	Rp894,338,024	100	Rp904,801,778	
			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase Rekomendasi masalah pelaksanaan pembangunan daerah sumber dana APBD dan APBN yang ditindaklanjuti oleh stakeholder.	Persen	100	100	Rp583,257,000	100	Rp383,515,000	100	Rp384,934,006	100	Rp392,401,725	100	Rp396,639,664	100	Rp401,280,348	
				Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Laporan	1	1	Rp303,257,000	12	Rp187,288,000	12	Rp187,980,966	12	Rp191,627,796	12	Rp193,697,377	12	Rp195,963,636	
				Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Laporan	1	1	Rp280,000,000	12	Rp196,227,000	12	Rp196,953,040	12	Rp200,773,929	12	Rp202,942,287	12	Rp205,316,712	
			Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Meningkatnya Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Persentase Rekomendasi masalah pelaksanaan pembangunan wilayah yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Persen	100	100	Rp450,000,000	100	Rp238,253,500	100	Rp239,135,038	100	Rp243,774,258	100	Rp246,407,020	100	Rp249,289,982	
				Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Laporan	3	3	Rp450,000,000	12	Rp238,253,500	12	Rp239,135,038	12	Rp243,774,258	12	Rp246,407,020	12	Rp249,289,982	
			Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya Pengendalian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Persentase Permasalahan pembangunan daerah yang dianalisa dan dirumuskan sebagai bahan kebijakan pembangunan daerah	Persen	100	100	Rp450,000,000	100	Rp242,976,200	100	Rp243,875,212	100	Rp248,606,391	100	Rp251,291,340	100	Rp254,231,449	

				Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	Dokumen	3	3	Rp150,000,000	4	Rp80,849,000	4	Rp81,148,141	4	Rp82,722,415	4	Rp83,615,817	4	Rp84,594,122	
				Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Laporan	1	1	Rp150,000,000	12	Rp81,502,400	12	Rp81,803,959	12	Rp83,390,956	12	Rp84,291,578	12	Rp85,277,789	
				Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Dokumen	1	1	Rp150,000,000	1	Rp80,624,800	1	Rp80,923,112	1	Rp82,493,020	1	Rp83,383,945	1	Rp84,359,537	
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN								Rp2,295,943,100		Rp1,657,380,900		Rp1,663,513,210		Rp1,695,785,366		Rp1,714,099,848		Rp1,734,154,816	
		Meningkatnya Dividen yang Disetorkan oleh BUMD kepada Pemerintah Provinsi			Persentase peningkatan dividen BUMD yang disetorkan ke Pemerintah Provinsi	Persen	-	5	Rp784,993,200	6	Rp530,608,000	7	Rp532,571,250	8	Rp542,903,132	9	Rp548,766,486	10	Rp555,187,054	
			Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Meningkatnya Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Persentase Analisis BUMD dan BLUD yang Ditindaklanjuti	Persen	100	100	Rp784,993,200	100	Rp530,608,000	100	Rp532,571,250	100	Rp542,903,132	100	Rp548,766,486	100	Rp555,187,054	
				Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Dokumen	12	12	Rp492,499,800	12	Rp327,185,600	Rp12	Rp328,396,187	12	Rp334,767,073	12	Rp338,382,557	12	Rp342,341,633	

				Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Dokumen	12	12	Rp292,493,400	12	Rp203,422,400	Rp12	Rp204,175,063	12	Rp208,136,059	12	Rp210,383,929	12	Rp212,845,421	
		Terjaganya Kestabilan Inflasi			Tingkat Inflasi	Persen	1.95	2,5 ± 1	Rp1,141,315,700	2,5 ± 1	Rp879,035,700	2,5 ± 1	Rp882,288,132	2,5 ± 1	Rp899,404,522	2,5 ± 1	Rp909,118,091	2,5 ± 1	Rp919,754,773	
			Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Meningkatnya Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Persentase Analisis Ekonomi yang Ditindaklanjuti	Persen	100	100	Rp466,226,400	100	Rp406,338,900	100	Rp407,842,354	100	Rp415,754,496	100	Rp420,244,645	100	Rp425,161,507	
				Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Dokumen	12	12	Rp215,599,800	12	Rp202,274,300	12	Rp203,022,715	12	Rp206,961,356	12	Rp209,196,539	12	Rp211,644,138	
				Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Dokumen	12	12	Rp250,626,600	12	Rp204,064,600	12	Rp204,819,639	12	Rp208,793,140	12	Rp211,048,106	12	Rp213,517,369	
			Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Meningkatnya Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Persentase Analisis Sumber Daya Alam yang Ditindaklanjuti	Persen	100	100	Rp675,089,300	100	Rp472,696,800	100	Rp474,445,778	100	Rp483,650,026	100	Rp488,873,447	100	Rp494,593,266	
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Dokumen	12	12	Rp182,472,600	12	Rp149,692,000	12	Rp150,245,860	12	Rp153,160,630	12	Rp154,814,765	12	Rp156,626,098	

				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Dokumen	12	12	Rp231,182,500	12	Rp143,752,100	12	Rp144,283,983	12	Rp147,083,092	12	Rp148,671,589	12	Rp150,411,047	
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Dokumen	12	12	Rp261,434,200	12	Rp179,252,700	12	Rp179,915,935	12	Rp183,406,304	12	Rp185,387,092	12	Rp187,556,121	
		Terwujudnya BLUD dengan nilai IKM sangat baik			Persentase BLUD dengan Nilai IKM sangat Baik	Persen	-	55	Rp369,634,200	60	Rp247,737,200	65	Rp248,653,828	70	Rp253,477,712	75	Rp256,215,271	80	Rp259,212,990	
			Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Meningkatnya Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Persentase Analisis BUMD dan BLUD yang Ditindaklanjuti	Persen	100	100	Rp369,634,200	100	Rp247,737,200	100	Rp248,653,828	100	Rp253,477,712	100	Rp256,215,271	100	Rp259,212,990	
				Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Dokumen	12	12	Rp369,634,200	12	Rp247,737,200	12	Rp248,653,828	12	Rp253,477,712	12	Rp256,215,271	12	Rp259,212,990	
	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA								Rp4,446,507,500		Rp3,398,124,600		Rp3,410,697,661		Rp3,476,865,189		Rp3,514,415,340		Rp3,555,534,000	

		Meningkatnya Efektivitas Pengadaan Barang dan Jasa SKPD di Provinsi Kalimantan Selatan			Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai	93.75	90	Rp4,446,507,500	90	Rp3,398,124,600	90	Rp3,410,697,661	90	Rp3,476,865,189	91	Rp3,514,415,340	92	Rp3,555,534,000	
					Rasio Nilai Belanja yang dilakukan melalui Pengadaan	Persen	73.36	30		30		30		30		30		30		
			Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terwujudnya proses pengadaan barang dan jasa sesuai kebutuhan daerah	Persentase proses pengadaan barang dan jasa Prov.Kalsel yang sesuai ketentuan perundang-undangan dan tepat waktu	Persen	100	100	Rp882,719,250	100	Rp676,516,250	100	Rp679,019,360	100	Rp692,192,330	100	Rp699,668,013	100	Rp707,854,129	
					Persentase pengadaan barang dan jasa dengan hasil evaluasi bebas mark up	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
					Persentase belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
				Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan hasil strategi pengadaan barang dan jasa	Laporan	2	2	Rp367,294,500	2	Rp288,661,500	2	Rp289,729,548	2	Rp295,350,301	2	Rp298,540,084	2	Rp302,033,003	
				Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	Laporan	12	12	Rp282,749,500	12	Rp212,645,500	12	Rp213,432,288	12	Rp217,572,875	12	Rp219,922,662	12	Rp222,495,757	

				Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa	Laporan	12	12	Rp232,675,250	12	Rp175,209,250	12	Rp175,857,524	12	Rp179,269,154	12	Rp181,205,267	12	Rp183,325,369	
			Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sistem Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik yang sesuai ketentuan	Persentase pemenuhan layanan pengadaan secara elektronik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persen	100	100	Rp1,756,639,500	100	Rp1,261,720,225	100	Rp1,266,388,590	100	Rp1,290,956,528	100	Rp1,304,898,859	100	Rp1,320,166,176	
					Persentase pemenuhan pelayanan publik	Persen	-	-		90		90		91		91		92		
					Rasio gangguan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang dapat diselesaikan	Rasio	0.8	0.8		0.8		0.8		1		0.8		1		
				Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah laporan pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik	Laporan	12	12	Rp801,445,000	12	Rp545,924,750	12	Rp547,944,672	12	Rp558,574,798	12	Rp564,607,406	12	Rp571,213,313	
				Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan pengembangan sistem informasi pengadaan barang dan jasa	Laporan	12	12	Rp468,889,000	12	Rp312,011,850	12	Rp313,166,294	12	Rp319,241,720	12	Rp322,689,531	12	Rp326,464,998	
				Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa	Laporan	12	12	Rp486,305,500	12	Rp403,783,625	12	Rp405,277,624	12	Rp413,140,010	12	Rp417,601,922	12	Rp422,487,865	

			Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Meningkatnya kualitas Kelembagaan UKPBJ Provinsi Kalimantan Selatan dan kualitas SDM Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase UKPBJ Provinsi, Kab/Kota dengan tingkat kematangan minimal level 3	Persen	54.55	85	Rp1,807,148,750	85.71	Rp1,459,888,125	93	Rp1,465,289,711	93	Rp1,493,716,331	100	Rp1,509,848,468	100	Rp1,527,513,695	
					Persentase SDM pengelola pengadaan barang dan jasa yang berkompeten	Persen	90.57	85		85		85		87		87		90		
					Persentase terpenuhinya layanan permasalahan pengadaan barang dan jasa	Persen	100	100		100		100		100		100		100		
				Pembinaan SDM Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan SDM pengadaan barang dan jasa	Orang	40	30	Rp626,194,625	40	Rp444,633,625	40	Rp446,278,769	45	Rp454,936,578	45	Rp459,849,893	50	Rp465,230,136	
				Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen hasil penataan kelembagaan pengadaan barang dan jasa	Dokumen	12	12	Rp466,503,500	12	Rp347,058,500	12	Rp348,342,616	12	Rp355,100,463	12	Rp358,935,548	12	Rp363,135,094	
				Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimtek pengadaan barang dan jasa	Dokumen	12	12	Rp714,450,625	12	Rp668,196,000	12	Rp670,668,325	12	Rp683,679,291	12	Rp691,063,027	12	Rp699,148,464	
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH								Rp3,606,137,500		Rp2,810,692,450		Rp2,821,092,012		Rp2,875,821,197		Rp2,906,880,066		Rp2,940,890,563	

		Meningkatnya Kualitas Kebijakan Bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama			Nilai Rata-Rata Kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Nilai	-	95,90	Rp3,606,137,500	96,10	Rp2,810,692,450	96,30	Rp2,821,092,012	96,60	Rp2,875,821,197	96,90	Rp2,906,880,066	97,10	Rp2,940,890,563	
					Nilai LPPD	Nilai	-	-		3,48		3,51		3,54		3,57		3,60		
					Persentase Realisasi Capaian SPM	Persen	96,97	-		97		97,25		97,50		97,75		98		
			Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Meningkatnya Fasilitasi Bidang Pemerintahan	Persentase Fasilitasi Rumusan Kebijakan yang menghasilkan Kebijakan Bidang Pemerintahan	Persen	100	100	Rp1,130,140,800	100	Rp892,720,100	100	Rp896,023,164	100	Rp913,406,013	100	Rp923,270,799	100	Rp934,073,067	
				Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Dokumen	1	1	Rp338,743,600	1	Rp230,334,200	1	Rp291,370,798	12	Rp297,023,391	12	Rp300,231,244	12	Rp303,743,949	
				Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Wilayah	Dokumen	1	1	Rp561,897,200	1	Rp173,596,800	1	Rp421,615,928	1	Rp429,795,277	1	Rp434,437,066	1	Rp439,519,980	
				Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Dokumen	1	1	Rp229,500,000	1	Rp128,779,700	1	Rp183,036,438	1	Rp186,587,345	1	Rp188,602,489	1	Rp190,809,138	

			Pelaksanaan Otonomi Daerah	Meningkatnya Fasilitas Bidang Otonomi Daerah	Persentase fasilitas rumusan kebijakan yang menghasilkan kebijakan bidang Otonomi Daerah	Persen	100	100	Rp1,163,182,000	100	Rp917,972,350	100	Rp921,368,848	100	Rp939,243,403	100	Rp949,387,231	100	Rp960,495,063	
				Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Dokumen	2	2	Rp340,358,400	2	Rp299,999,800	2	Rp301,109,799	2	Rp306,951,329	2	Rp310,266,404	2	Rp313,896,521	
				Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang dilaksanakan	Dokumen	1	1	Rp414,823,600	1	Rp300,000,000	1	Rp301,110,000	1	Rp306,951,534	1	Rp310,266,611	1	Rp313,896,730	
				Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Laporan	2	2	Rp408,000,000	2	Rp317,972,550	2	Rp319,149,049	2	Rp325,340,540	2	Rp328,854,217	2	Rp332,701,812	
			Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Meningkatnya Fasilitas Bidang Kerja Sama	Persentase Fasilitas Rumusan Kebijakan yang menghasilkan Kebijakan Bidang Kerja Sama	Persen	100	100	Rp1,312,814,700	100	Rp1,000,000,000	100	Rp1,003,700,000	100	Rp1,023,171,781	100	Rp1,034,222,035	100	Rp1,046,322,433	
				Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang difasilitasi	Dokumen	54	54	Rp558,761,300	54	Rp325,000,000	54	Rp326,202,500	54	Rp332,530,829	54	Rp336,122,161	54	Rp340,054,791	
				Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang difasilitasi	Dokumen	40	40	Rp388,293,400	40	Rp400,000,000	40	Rp401,480,000	40	Rp409,268,712	40	Rp413,688,814	40	Rp418,528,973	
				Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama yang dievaluasi	Laporan	2	2	Rp365,760,000	2	Rp275,000,000	2	Rp276,017,500	2	Rp281,372,240	2	Rp284,411,060	2	Rp287,738,669	

	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM								Rp4,592,475,200		Rp3,678,127,100		Rp3,691,736,169		Rp3,763,355,853		Rp3,804,000,096		Rp3,848,506,897	
		Meningkatnya Kualitas Produk Hukum Daerah, Layanan Informasi Produk Hukum Daerah, Dan Bantuan Hukum Dalam Koordinasi Dan Fasilitasi Bidang Hukum			Persentase Produk Hukum Daerah Yang Ditetapkan	Persen	100	100	Rp4,592,475,200	100	Rp3,678,127,100	Rp100	Rp3,691,736,169	100	Rp3,763,355,853	Rp100	Rp3,804,000,096	100	Rp3,848,506,897	
					Persentase Pemenuhan Bantuan Hukum Pemerintah Daerah	Persen	100	100		100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	
					Indeks Reformasi Hukum (IRH)	Indeks	97.46	97.56		97.66	-	97.75	-	97.85	-	97.95	-	98.05	-	
					Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	Poin	0	50		55	-	65	-	65	-	70	-	70	-	
		Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Tercapainya Kualitas Dan Efektifitas Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan Provinsi Dan Kabupaten/Kota	Persentase Peraturan Perundang-Undangan Provinsi Yang Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan	Persen	100	100	Rp2,898,621,200	100	Rp2,364,808,500	100	Rp2,373,558,290	100	Rp2,419,605,323	100	Rp2,445,737,061	100	Rp2,474,352,184		

					Persentase Peraturan Perundang-Undangan Kab/Kota Yang Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan	Persen	100	100	Rp761,383,200	100	Rp653,894,200	100	Rp656,313,609	100	Rp669,046,093	100	Rp676,271,790	100	Rp684,184,170	
				Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan Yang Disusun	Dokumen	60	60	Rp1,325,393,000	60	Rp1,182,000,100	60	Rp1,186,373,499	60	Rp1,209,389,147	60	Rp1,222,450,550	60	Rp1,236,753,221	
				Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan Yang Disusun	Dokumen	450	500	Rp295,187,000	1000	Rp271,399,700	1000	Rp272,403,879	1000	Rp277,688,514	1000	Rp280,687,550	1000	Rp283,971,594	
				Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota Yang Difasilitasi Dan Dievaluasi	Dokumen	125	125	Rp761,383,200	125	Rp653,894,200	135	Rp656,313,609	135	Rp669,046,093	135	Rp676,271,790	135	Rp684,184,170	
			Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Tersedianya Produk Hukum Daerah yang Terpublikasi dengan baik	Persentase Peraturan Perundang-Undangan Provinsi Yang Terpublikasi	Persen	100	100	Rp516,658,000	100	Rp257,514,500	100	Rp258,467,304	100	Rp263,481,569	100	Rp266,327,170	100	Rp269,443,198	
				Pendokumentasian Produk Hukum Dan Naskah Hukum Lainnya	Jumlah Produk Hukum Yang Didokumentasi Dan Dikelola Informasi Hukumnya	Dokumen	500	500	Rp674,658,000	500	Rp257,514,500	500	Rp258,467,304	500	Rp263,481,569	500	Rp266,327,170	500	Rp269,443,198	
			Fasilitasi Bantuan Hukum	Terselesaikannya Fasilitasi Masalah Hukum (Litigasi) Dan (Non Litigasi & HAM)	Persentase Bantuan/Layanan Hukum Litigasi Di Pengadilan yang diberikan	Persen	100	100	Rp1,693,854,000	100	Rp1,313,318,600	100	Rp1,318,177,879	100	Rp1,343,750,530	100	Rp1,358,263,035	100	Rp1,374,154,713	
					Persentase Bantuan/Layanan Hukum Non Litigasi Di Luar Pengadilan & P5 HAM Kab/Kota yang diberikan	Persen	100	100		100	Rp256,068,000	100	Rp257,015,452	100	Rp262,001,551	100	Rp264,831,168	100	Rp267,929,693	
				Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum Yang Diselesaikan	Kasus	6	12	Rp1,363,590,000	12	Rp1,057,250,600	12	Rp1,061,162,427	12	Rp1,081,748,978	12	Rp1,093,431,867	12	Rp1,106,225,020	

				Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi Dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi Dan HAM Yang Diselesaikan	Kasus	12	12	Rp330,264,000	12	Rp256,068,000	12	Rp257,015,452	12	Rp262,001,551	12	Rp264,831,168	12	Rp267,929,693	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										Rp200,302,548,403		Rp201,043,667,831		Rp204,943,914,986		Rp207,157,309,271		Rp209,581,049,787	
		Meningkatnya Kelancaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah			Persentase Kegiatan Tepat Waktu	Persen	-	-		100	Rp200,302,548,403	100	Rp201,043,667,831	100	Rp204,943,914,986	100	Rp207,157,309,271	100	Rp209,581,049,787	
					Persentase Laporan/Telaahan Staf Tepat Waktu	Persen	-	-		100		100		100		100		100		
					Nilai Kepatuhan Pengelolaan Administrasi Internal	Nilai	-	-		100		100		100		100		100		
					Persentase Aduan/Keluhan antar Bidang terkait Layanan Sekretariat	Persen	-	-		100		100		100		100		100		
					Persepsi Internal antar Bidang/Unit terhadap Layanan Sekretariat	Persen	-	-		100		100		100		100		100		
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Baik	Persentase Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Baik	Persen	100	100	Rp9,361,391,700	100	Rp9,739,674,600	100	Rp9,775,711,395	100	Rp9,965,360,195	100	Rp10,072,986,087	100	Rp10,190,840,024	

				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	12	12	Rp1,678,522,000	12	Rp1,564,377,600	12	Rp1,570,165,797	12	Rp1,600,627,014	12	Rp1,617,913,785	12	Rp1,636,843,377	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	6	Rp1,181,676,700	6	Rp1,252,116,800	6	Rp1,256,749,631	6	Rp1,281,130,573	6	Rp1,294,966,785	6	Rp1,310,117,897	
				Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data	-	-	-	3	Rp532,560,200	3	Rp534,530,673	3	Rp544,900,568	3	Rp550,785,494	3	Rp557,229,684	
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	2	Rp6,501,193,000	2	Rp6,390,620,000	2	Rp6,414,265,294	2	Rp6,538,702,041	2	Rp6,609,320,023	2	Rp6,686,649,067	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Baik	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Baik	Persen	100	100	Rp87,054,301,700	100	Rp98,918,722,500	100	Rp99,284,721,773	100	Rp101,210,845,376	100	Rp102,303,922,506	Rp100	Rp103,500,878,399	
				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	12	Rp2,107,814,800	12	Rp1,196,217,600	12	Rp1,200,643,605	12	Rp1,223,936,091	12	Rp1,237,154,601	100	Rp1,251,629,310	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	12	12	Rp451,342,200	12	Rp649,352,300	12	Rp651,754,904	12	Rp664,398,949	12	Rp671,574,457	12	Rp679,431,878	
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	4	4	Rp345,441,400	4	Rp324,152,900	4	Rp325,352,266	4	Rp331,664,100	4	Rp335,246,072	4	Rp339,168,451	

				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	12	12	Rp115,689,200	12	Rp109,884,100	12	Rp110,290,671	12	Rp112,430,310	12	Rp113,644,558	12	Rp114,974,199	
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	4	4	Rp739,066,200	4	Rp849,925,800	4	Rp853,070,525	4	Rp869,620,094	4	Rp879,011,991	4	Rp889,296,431	
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	4	4	Rp371,547,900	4	Rp427,279,800	4	Rp428,860,735	4	Rp437,180,634	4	Rp441,902,184	4	Rp447,072,440	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	12	Rp82,923,400,000	12	Rp95,361,910,000	12	Rp95,714,749,067	12	Rp97,571,615,199	12	Rp98,625,388,643	12	Rp99,779,305,690	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Baik	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Baik	Persen	100	100	Rp20,633,138,025	100	Rp10,363,825,225	100	Rp10,402,171,378	100	Rp10,603,973,503	100	Rp10,718,496,417	100	Rp10,843,902,825	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	344	344	Rp1,864,983,000	344	Rp2,010,306,100	344	Rp2,017,744,233	344	Rp2,056,888,471	344	Rp2,079,102,866	344	Rp2,103,428,370	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	172	172	Rp804,205,800	172	Rp508,734,400	172	Rp510,616,717	172	Rp520,522,682	172	Rp526,144,327	172	Rp532,300,215	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	Rp14,483,784,200	12	Rp6,037,668,900	12	Rp6,060,008,275	12	Rp6,177,572,435	12	Rp6,244,290,218	12	Rp6,317,348,413	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	20	20	Rp1,681,540,000	20	Rp760,778,500	20	Rp763,593,380	20	Rp778,407,092	20	Rp786,813,889	20	Rp796,019,611	
				Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	12	12	Rp648,065,525	12	Rp592,755,725	12	Rp594,948,921	12	Rp606,490,930	12	Rp613,041,032	12	Rp620,213,612	

				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	28	28	Rp382,944,500	28	Rp176,497,600	28	Rp177,150,641	28	Rp180,587,364	28	Rp182,537,707	28	Rp184,673,398	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12	Rp665,000,000	12	Rp225,000,000	12	Rp225,832,500	12	Rp230,213,651	12	Rp232,699,958	12	Rp235,422,547	
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	1	Rp102,615,000	1	Rp52,084,000	1	Rp52,276,711	1	Rp53,290,879	1	Rp53,866,420	1	Rp54,496,658	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Baik	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Baik	Persen	100	100	Rp1,814,617,400	100	Rp1,214,342,600	100	Rp1,218,835,668	100	Rp1,242,481,080	100	Rp1,255,899,875	100	Rp1,270,593,904	
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	9	9	Rp622,000,000	9	Rp266,500,000	9	Rp267,486,050	9	Rp272,675,279	9	Rp275,620,172	9	Rp278,844,928	
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	46	46	Rp206,412,600	46	Rp178,746,000	46	Rp179,407,360	46	Rp182,887,863	46	Rp184,863,052	46	Rp187,025,950	
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	46	46	Rp628,164,800	46	Rp375,308,600	46	Rp376,697,242	46	Rp384,005,168	46	Rp388,152,424	46	Rp392,693,807	
				Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	17	17	Rp305,418,800	17	Rp335,908,000	17	Rp337,150,860	17	Rp343,691,586	17	Rp347,403,455	17	Rp351,468,076	
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	-	2	Rp52,621,200	2	Rp57,880,000	2	Rp58,094,156	2	Rp59,221,183	2	Rp59,860,771	2	Rp60,561,142	

			Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bulan	12	12	Rp9,318,779,045	12	Rp10,716,595,898	12	10,756,247,303	12	Rp10,964,918,500	12	11,083,339,620	12	Rp11,213,014,694	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Bulan	12	12	Rp9,318,779,045	12	Rp10,716,595,898	12	Rp10,756,247,303	12	Rp10,964,918,500	12	Rp11,083,339,620	12	Rp11,213,014,694	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Baik	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Baik	Persen	100	100	Rp26,091,070,184	100	Rp7,705,360,476	100	Rp7,733,870,310	100	Rp7,883,907,394	100	Rp7,969,053,594	100	Rp8,062,291,521	
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	Rp584,956,000	12	Rp632,056,000	12	Rp634,394,607	12	Rp646,701,863	12	Rp653,686,243	12	Rp661,334,372	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	Rp8,237,467,784	12	Rp1,716,104,976	12	Rp1,722,454,564	12	Rp1,755,870,183	12	Rp1,774,833,581	12	Rp1,795,599,134	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	Rp14,409,646,400	12	Rp4,072,699,500	12	Rp4,087,768,488	12	Rp4,167,071,197	12	Rp4,212,075,566	12	Rp4,261,356,850	
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	344	344	Rp2,859,000,000	344	Rp1,284,500,000	344	Rp1,289,252,650	344	Rp1,314,264,151	344	Rp1,328,458,204	344	Rp1,344,001,165	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Baik	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Baik	Persen	100	100	Rp27,375,126,200	100	Rp22,364,930,800	100	Rp22,447,681,044	100	Rp22,883,166,056	100	Rp23,130,304,250	100	Rp23,400,928,809	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	27	28	Rp13,553,833,700	28	Rp11,987,090,300	28	Rp12,031,442,534	28	Rp12,264,852,519	28	Rp12,397,312,926	28	Rp12,542,361,488	

				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	33	51	Rp55,930,000	51	Rp55,280,000	51	Rp55,484,536	51	Rp56,560,936	51	Rp57,171,794	51	Rp57,840,704	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	21	23	Rp2,325,790,000	23	Rp1,015,320,000	23	Rp1,019,076,684	23	Rp1,038,846,772	23	Rp1,050,066,317	23	Rp1,062,352,093	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	190	200	Rp6,761,129,000	200	Rp4,360,964,000	200	Rp4,377,099,567	200	Rp4,462,015,298	200	Rp4,510,205,064	200	Rp4,562,974,463	
				Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit	15,000	15,000	Rp3,714,427,000	15,000	Rp4,085,868,000	15,000	Rp4,100,985,712	15,000	Rp4,180,544,834	15,000	Rp4,225,694,719	15,000	Rp4,275,135,347	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	28	28	Rp542,978,000	28	Rp397,268,000	28	Rp398,737,892	28	Rp406,473,407	28	Rp410,863,319	28	Rp415,670,420	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Ha	10	10	Rp421,038,500	10	Rp463,140,500	10	Rp464,854,120	10	Rp473,872,290	10	Rp478,990,111	10	Rp484,594,295	
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang baik	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang baik	Persen	100	100	Rp154,619,500	100	Rp185,543,400	100	Rp186,229,911	100	Rp189,842,771	100	Rp191,893,073	100	Rp194,138,222	
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	1	Rp154,619,500	1	Rp185,543,400	1	Rp186,229,911	1	Rp189,842,771	1	Rp191,893,073	1	Rp194,138,222	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang baik	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang baik	Persen	100	100	Rp43,858,693,600	100	Rp29,620,115,500	100	Rp29,729,709,927	100	Rp30,306,466,300	100	Rp30,633,776,136	100	Rp30,992,191,317	

				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	293	262	Rp8,023,406,000	262	Rp9,193,744,000	262	Rp9,227,760,853	262	Rp9,406,779,413	262	Rp9,508,372,631	262	Rp9,619,620,591	
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	90	57	Rp32,428,507,000	57	Rp16,680,920,500	57	Rp16,742,639,906	57	Rp17,067,447,120	57	Rp17,251,775,549	57	Rp17,453,621,323	
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	85	14	Rp3,406,780,600	14	Rp3,745,451,000	14	Rp3,759,309,169	14	Rp3,832,239,767	14	Rp3,873,627,956	14	Rp3,918,949,403	
		Meningkatnya Tata Kelola Layanan Keprotokolan dan Penyusunan Materi Komunikasi Pimpinan untuk mendukung kelancaran Pelaksanaan Tugas Pimpinan Daerah			Persentase pemenuhan layanan keprotokolan dan materi komunikasi pimpinan yang diselesaikan tepat waktu	Persen	-	-	Rp12,305,915,804	100	Rp18,946,874,808	100	Rp19,016,978,245	100	Rp19,385,907,623	100	Rp19,595,275,426	100	Rp19,824,540,145	
			Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Tercapainya Kualitas Bahan Materi dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Tercapainya Kualitas Bahan Materi dan Komunikasi Pimpinan	Persen	100	100	Rp10,307,718,004	100	Rp8,058,437,604	100	Rp8,088,253,823	100	Rp8,245,165,947	100	Rp8,334,213,740	100	Rp8,431,724,039	
				Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	Dokumen	12	12	Rp318,710,000	12	Rp230,000,000	12	Rp230,851,000	12	Rp235,329,509	12	Rp237,871,068	12	Rp240,654,160	
				Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	12	12	Rp2,167,545,204	12	Rp1,638,108,604	12	Rp1,644,169,606	12	Rp1,676,066,496	12	Rp1,694,168,015	12	Rp1,713,989,779	
				Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Laporan	12	12	Rp7,821,462,800	12	Rp6,190,329,000	12	Rp6,213,233,217	12	Rp6,333,769,942	12	Rp6,402,174,657	12	Rp6,477,080,101	
			Fasilitasi Keprotokolan	Tercapainya Kualitas Fasilitasi Keprotokolan	Persentase Tercapainya Kualitas Fasilitasi Keprotokolan	Persen	100	100	Rp1,998,197,800	100	Rp1,414,999,800	100	Rp1,420,235,299	100	Rp1,447,787,864	100	Rp1,463,423,973	100	Rp1,480,546,033	

				Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Laporan	12	12	Rp708,094,000	12	Rp515,000,000	12	Rp516,905,500	12	Rp526,933,467	12	Rp532,624,348	12	Rp538,856,053	
				Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Laporan	12	12	Rp601,826,000	12	Rp449,999,800	12	Rp451,664,799	12	Rp460,427,096	12	Rp465,399,709	12	Rp470,844,886	
				Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Laporan	12	12	Rp688,277,800	12	Rp450,000,000	12	Rp451,665,000	12	Rp460,427,301	12	Rp465,399,916	12	Rp470,845,095	

4.4 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025–2029 diwujudkan melalui pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang merepresentasikan output dari pelaksanaan program dan subkegiatan strategis. IKK digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan fungsi koordinasi, fasilitasi, pelayanan administrasi, serta dukungan teknis kepada kepala daerah. Fokus pengukuran IKK meliputi peningkatan ketepatan waktu penyampaian dokumen, kualitas pelayanan internal, serta efektivitas pelaksanaan kebijakan strategis daerah. Pencapaian target IKK menjadi tolok ukur utama dalam memastikan ketercapaian sasaran pembangunan yang akuntabel dan terukur.

Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA			
	Program kebijakan dan pelayanan pengadaan barang dan jasa	Terwujudnya proses pengadaan barang dan jasa sesuai kebutuhan daerah	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	
			Pengelolaan strategi pengadaan barang dan jasa	
			Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	
			Pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa	
		Meningkatnya kualitas kelembagaan UKPBJ Prov.Kalsel dan kualitas SDM	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	

		Pengadaan Barang dan Jasa		
			Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	
			Pembinaan SDM Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa	
		Meningkatnya kualitas layanan konsultasi pendampingan dan bimtek PBJ	Pendampingan, Konsultasi dan/atau Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa	
		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Meningkatnya kualitas pengelolaan sistem pengadaan barang & jasa secara elektronik yang sesuai ketentuan	
			Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	
			Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	
			Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	
	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT			
	Program Kesejahteraan Rakyat	Meningkatnya Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual	
			Pengelolaan sarana dan prasarana spiritual	
			Fasilitasi kelembagaan bina spiritual	
			Fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar	

			Fasilitasi,koordinasi,sinkronisasi,evaluasi,dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat bidang pendidikan	
			Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	
			Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	
			Fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	

**4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan**

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA									
	Predikat Indeks Tata kelola Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Nilai		90	90	90	90	90	90	
	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen		30	30	30	30	30	30	
	Nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Nilai		95	95	95	95	95	95	
	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT									
	Tingkat kondusifitas kerukunan umat beragama	Poin		74.3	74.7	75.1	75.51	75.91	76.32	
	Persentase peningkatan pengumpulan zakat, nfak, dan sadakah (ZIS)	Persen		32	33	34	35	37	38	
	Persentase kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar yang ditindaklanjuti	Persen		-	100	100	100	100	100	
	BIRO HUKUM									
	Persentase Produk Hukum Daerah Yang Ditetapkan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	
	Persentase Pemenuhan Bantuan Hukum Pemerintah Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100	100	

	Indeks Reformasi Hukum (IRH)	Poin	N/A	0	55	65	65	70	70	untuk IRH Tahun 2025 belum keluar hasil dari Pusat
	Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)	Poin	N/A	0	55	65	65	70	70	untuk IKK Tahun 2025 belum keluar hasil dari Pusat

4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET TAHUN						KET
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA									
	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	73.36	30	30	30	30	30	30	

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 – 2029 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, merupakan acuan dan panduan bagi seluruh biro-biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Diharapkan Rencana Strategis (RENSTRA) ini dapat menjadi komitmen dan kesatuan dalam menentukan arah dan peran Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Kalimantan Selatan sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 – 2029 dan RPJP Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 – 2045. Selanjutnya dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) biro-biro pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan setiap tahunnya, sebagai pedoman dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Banjarbaru, Maret 2025

Sekretaris Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan,


MUHAMMAD SYARIFUDDIN, M.Pd
Pemula Utama Madya
NIP. 19671030 199412 1 003